PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAPORAN AKHIR



2021

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG BARAT

bappelitbangda



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Akhir ini. Laporan ini disusun atas keterbatasan khususnya pada saat pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam kontrak pekerjaan, maka disusun laporan akhir sebagai bentuk telah berakhirnya kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pada laporan akhir ini berisi antara lain pendahuluan, tinjauan kebijakan, pendekatan dan metodologi, gambaran umum, dan perumusan kebijakan serta strategi.

Laporan akhir ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan penulis dan pemerintah daerah setempat dalam menindak lanjuti langkah – langkah yang harus ditempuh untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat**. Demikian laporan akhir ini disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

TIM PENYUSUN

bappeltibanda



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VII

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran I-2

1.2.1 Maksud I-2

1.2.2 Tujuan I-2

1.2.3 Sasaran I-3

1.3 Ruang Lingkup I-3

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi I-3

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah I-4

1.4 Dasar Hukum I-4

1.5 Sistematika Penulisan I-6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pemberdayaan Gender II-1

2.2 Kesetaraan Gender dan Pembangunan Manusia II-3

2.2.1 Urgensi Kesetaraan Gender II-3

2.2.2 Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

bappelitbangda

(SDGs) II-6
2.2.3 Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan dalam RPJMN 2019 – 2024 ..... II-11
2.2.4 Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian PPPA II-12
2.3 Tinjauan Kebijakan II-13
2.3.1 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional II-13
2.3.2 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bandung Barat II-14
2.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 ..... II-16

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Pendekatan 3-1
3.1.1 *Mixed Scanning Planning Approach* 3-1
3.1.2 Pendekatan Komparatif 3-3
3.1.3 *Participatory Approach* 3-4
3.2 Metodologi 3-5
3.2.1 Tahap Pelaksanaan Kegiatan 3-5
3.2.2 Metoda Pengumpulan Data 3-8
3.2.3 Metode Analisis 3-9

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Administrasi 4-1
4.2 Kondisi Fisik 4-4
4.3 Kondisi Sosial Kependudukan 4-15
4.4 Ekonomi 4-19

BAB V PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN IPG DAN IDG

5.1 Penentuan Sampel 5-1
5.2 Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) 5-3
5.3 Analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 5-5

bappelitbangda

5.4 Perumusan Isu Strategis 5-7
5.5 Kebijakan, Strategi, dan Rekomendasi 5-9

bappelitbangda



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender 2-2
Tabel II.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-1 2-19
Tabel II.3 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-2 2-20
Tabel II.4 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-3 2-21
Tabel II.5 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-4 2-21
Tabel II.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ke-1 2-22
Tabel III.1 Metodologi Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) . 3-11
Tabel III.2 Perbedaan Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3-12
Tabel III.3 Metodologi Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 3-12
Tabel III.4 Matrik SWOT 3-14
Tabel IV.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan 4-2
Tabel IV.2 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bandung Barat 4-4
Tabel IV.3 Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat 4-5
Tabel IV.4 Kondisi Morfologi di Kabupaten Bandung Barat 4-5
Tabel IV.5 Kondisi CAT di Kabupaten Bandung Barat 4-6
Tabel IV.6 Kondisi DAS di Kabupaten Bandung Barat 4-6

bappelitbangda

Tabel IV.7 Kondisi DAS di Kabupaten Bandung Barat 4-6
Tabel IV.8 Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat 4-7
Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 4-15
Tabel IV.10 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2019 4-16
Tabel IV.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020 4-18
Tabel IV.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Menurut Kecamatan (Angka Regional) 4-18
Tabel IV.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (Juta Rupiah) Tahun 2015 - 2019 4-20
Tabel IV.14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (Juta Rupiah) Tahun 2015 - 2019 4-21
Tabel V.1 Pembagian Jumlah Sampel Dirinci Per Kecamatan 5-2
Tabel V.2 Metodologi Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) ... 5-3
Tabel V.3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 5-4
Tabel V.4 Metodologi Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) .. 5-5
Tabel V.5 Data Keterwakilan Parlemen di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 5-6
Tabel V.6 Jumlah PNS di Kabupaten Bandung Barat 5-6
Tabel V.7 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 5-7
Tabel V.8 Kebijakan, Strategi, dan Rekomendasi dalam Upaya Peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Bandung Barat 5-9

bappeltbangda



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) 2-7
Gambar 3.1 Perkembangan dan Penyempurnaan IPG dan IDG 3-10
Gambar 3.2 Konsep Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 3-11
Gambar 3.3 Matrik SWOT 3-14
Gambar 4.1 Distribusi Persentase Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan 4-2
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat 4-3
Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Bandung Barat 4-8
Gambar 4.4 Peta Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat 4-9
Gambar 4.5 Peta Morfologi di Kabupaten Bandung Barat 4-10
Gambar 4.6 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Bandung Barat 4-11
Gambar 4.7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bandung Barat 4-11
Gambar 4.8 Peta Curah Hujan di Kabupaten Bandung Barat 4-12
Gambar 4.9 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat 4-13
Gambar 4.10 Grafik Perbandingan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 4-16
Gambar 4.11 Kepadataan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 4-17
Gambar 5.1 Visualisasi Pelaksanaan Kuisioner 5-3
Gambar 5.2 Perbandingan Komponen IPG Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

Tahun 2021 5-5
Gambar 5.3 Grafik Keterwakilan Parlemen di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Gender Tahun 2021 5-6
Gambar 5.4 Grafik Perbandingan PNS di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Gender Tahun 2021 5-7

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG BARAT



bappelitbangda

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender bukan dimaknai sebagai perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Dalam mengukur kesetaraan gender tersebut, ada beberapa indeks yang digunakan yaitu IPM, IPG, dan IDG. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran kualitas hidup manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Ukuran tersebut kemudian digunakan untuk mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi yaitu dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, kegiatan politik dengan indikator keterlibatan perempuan di parlemen, serta dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi, teknisi.

Kesimpulannya, IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Terwujudnya pemberdayaan gender dan meningkatnya perlindungan perempuan dan anak, termasuk sasaran stategis untuk mewujudkan misi ke-1 pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023, yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator sasaran dari terwujudnya pemberdayaan gender adalah IPG, sedangkan IDG merupakan indikator dari sasaran meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, nilai IPG Kabupaten Bandung Barat adalah 79,18 (Tahun 2018), 79,29 (Tahun 2019) dan 79,06 (Tahun 2020), sedangkan nilai IDG sebesar 62,71 (Tahun 2018), 64,53 (Tahun 2019) dan 65,40 (Tahun 2020). Nilai IPG dan IDG ini masih di bawah Provinsi Jawa Barat, dimana nilai IPG dan IDG Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020 adalah sebesar 79,06 dan 70,24. Adapun target capaian IDG Kabupaten Bandung Barat yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah 54,13 (Tahun 2020), 63,5 (Tahun 2021), 64,31 (Tahun 2022) dan 65,11 (Tahun 2023), sedangkan target capaian IPG adalah 79,64 (Tahun 2020), 79,34 (Tahun 2021), dan 79,39 (Tahun 2022) serta 79,44 (Tahun 2023).

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui BAPPELITBANGDA akan melakukan kajian penyusunan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 untuk mengetahui besar capaian sasaran strategis terwujudnya pemberdayaan gender dan meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dan sebagai bahan untuk perencanaan,dan evaluasi pembangunan serta perumusan kebijakan.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Maksud kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk mengetahui nilai IPG dan IDG Kabupaten Bandung Barat sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan serta perumusan kebijakan, juga tersusunnya strategi agar target IPG pada tahun terakhir RPJMD dapat tercapai.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dilaksanakannya pekerjaan ini adalah

a) Menghitung Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021
b) Menghitung Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021
c) Merumuskan strategi, arah kebijakan dan rekomendasi dalam peningkatan indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat

1.2.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah membantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam strategi, arah kebijakan dan rekomendasi dalam peningkatan capaian pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bandung Barat.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender, adalah sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Pekerjan ini meliputi:

(1) Pengumpulan Data

Data yang dimaksud adalah *collecting data* dengan cara mengutip atau menyalin dokumen-dokumen yang relevan untuk digunakan sebagai data dalam kajian ini.

(2) Pengolahan Data

Dari hasil data tersebut di atas dilakukan pengolahan data agar lebih berisi, terorganisir dan mudah dimengerti.

(3) Penyajian Data

Dari hasil pengolahan data kemudian dibuatlah formulasi dalam penyajian data yang diharapkan mudah dipahami, dimengerti dan menarik dalam bentuk Buku Laporan.

b. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu:

1. Persiapan:
   - Pemantapan pemahaman Kerangka Acuan Kerja;
   - Pengembangan dan pemantapan metodologi kerja;

- Identifikasi kelengkapan dan keterkaitan data;
- Program kerja dan jadwal pelaksanaan.

2. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder
   - Data Sekunder didapatkan dari studi literatur, dokumentasi, studi terdahulu dan data/informasi lain yang relevan dari Perangkat Daerah dan instansi-instansi terkait.
   - Data Primer didapatkan hasil dari Peninjauan Lapangan dan *Foccus Group Discussion* (FGD)
3. Pengkajian dan Analisis.
   - Analisis yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dapat berupa analisis naratif deskriptif yang didukung dengan tabel, chart maupun angka persentase.
   - Melakukan pengumpulan data, perhitungan dan analisis capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender.
   - Merumuskan permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender.
   - Merumuskan strategi, arah kebijakan dan rekomendasi dalam peningkatan capaian pembangunan gender dan pemberdayaan gender.
   - Data dan informasi yang didapatkan disusun dalam bentuk laporan.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup pelaksanaan kegiatan ini berada di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari :

(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;

(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;

bappelitbangda

(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
(5) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
(8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
(9) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025;
(10) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029;
(11) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023;
(12) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat;
(13) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
(14) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Teknis Pengarutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
(15) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021;
(16) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang kegiatan, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran kegiatan.. Bab ini juga menjelaskan ruang lingkup baik ruang lingkup wilayah maupun ruang lingkup substansi serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan teori dan tinjauan kebijakan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB III PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Bab ini berisikan pendekatan pelaksanaan pekerjaan termasuk pendekatan pemetaan maupun jalan.

Sedangkan metodologi pekerjaan mencakup kerangka berfikir, tahapan pelaksanaan pekerjaan yang ditempuh, metoda pengumpulan data dan metoda analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah perencanaan yaitu Kabupaten Bandung Barat.

BAB V PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN IPG DAN IDG

Bab ini membahas mengenai analisa dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang kemudian dirumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bandung Barat

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG BARAT



bappelitbangda

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pemberdayaan Gender

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar masyarakat. Dalam perhitungannya digunakan beberapa komponen yaitu angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata- rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

2.1.2 Komponen Pembangunan Manusia

Dalam menghitung komponen pembangunan manuasi terdapat dua indikator untuk mengukur aspek gender, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sementara IDG menunjukkan apakah perempuan dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik.

bappeltbangda

2.1.3 Konsep Gender

Diskriminasi gender menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan yang disebut dengan ketimpangan gender. Di berbagai wilayah di dunia, seperti di Indonesia, ketimpangan ini diperkuat dengan tumbuhnya budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki dibanding perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki - laki sebagai pihak yang bertanggungjawab pada peran publik, sedangkan perempuan hanya berkutat di peran domestik. Berikut beberapa definisi konsep tentang gender dan pembangunan gender: gender, isu gender, peran gender, analisis gender, persepektif gender, gender responsif, ketidakadilan gender, kesetaraan gender (gender equity), keadilan gender (gender equality), kesetaraan dan keadilan gender (kkg), disparitas/ kesenjangan/ ketimpangan gender, pengarusutamaan gender (pug), indeks pembangunan manusia (ipm), dan indeks pembangunan gender (ipg).

2.1.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel II.1 Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

Dimensi	Indikator	IDG
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan	atau
Pengambilan Keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesioanl dan teknisi, laki-laki dan perempuan	GEM
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

IDG didapat dari rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan. Meski sama-sama digunakan dalam mengukur capaian kesetaraan gender, IDG berbeda dengan IPG. IPG mengukur capaian kualitas pembangunan manusia terpilah gender dari sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi sedangkan IDG melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan dan ekonomi.

2.2 Kesetaraan Gender dan Pembangunan Manusia

2.2.1 Urgensi Kesetaraan Gender

Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015). Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya.

Realitas pembangunan manusia di Indonesia masih terus diperjuangkan untuk mencapai harapan terbaiknya. Pemenuhan hak dasar manusia, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih terus menjadi prioritas utama. Kesenjangan capaian pada perempuan dan laki-laki yang masih dijumpai menjadi landasan arah pembangunan manusia ke depan. Tantangan pembangunan manusia di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan struktural dan kultural. Secara struktural, keberpihakan pada pembangunan yang berkesetaraan gender masih perlu diperkuat melalui penguatan sistem, perspektif, dan analisis gender para pengambil kebijakan dan pelaksana program. Secara kultural, konstruksi gender yang masih merugikan salah satu kelompok jenis kelamin, terutama pada perempuan masih kuat mengakar. Budaya patriarki masih terlihat dalam praktik kehidupan masyarakat yang berdampak pada hasil-hasil pembangunan. Stereotip yang terus dikonstruksi berakibat pada posisi perempuan yang secara budaya diposisikan lebih rendah sehingga pengambilan keputusan masih belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan terbaik perempuan. Situasi ini berpengaruh pada proses pembangunan, dan pada akhirnya berdampak pada capaian pembangunan manusia Indonesia.

Di bidang pendidikan, capaian pembangunan telah menunjukkan kesetaraan, terutama pada pendidikan yang ditamatkan perempuan di tingkat dasar dan menengah. Hal ini terlihat pada kepemilikan ijazah tertinggi, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni antara perempuan dan laki-laki yang sudah setara. Meskipun secara nasional sudah menunjukkan hasil yang diharapkan, namun kesenjangan berdasarkan wilayah kota dan desa masih menjadi persoalan pembangunan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai contoh, jika dilihat secara nasional, angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki

telah setara, terutama pada penduduk usia 15-24 tahun, meskipun masih terjadi kesenjangan di wilayah perdesaan dan baru 21 provinsi yang telah mencapai angka melek huruf lebih dari target RPJMN tahun 2019 atau di atas 96,1 persen (Kemen. PPPA, 2020a). Hal ini menunjukkan agenda pembangunan manusia di bidang pendidikan belum selesai, terutama di wilayah perdesaan dan di provinsi yang belum mencapai target RPJMN.

Pembangunan manusia di bidang kesehatan masih perlu diperjuangkan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih jauh dari harapan target SDG's untuk sampai pada angka 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2030. Meskipun persentase persalinan perempuan yang telah ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di tahun 2019 telah mencapai 94,71 persen, namun data BPS menunjukkan perkawinan pertama pada perempuan usia di bawah 19 tahun masih sangat tinggi, yaitu usia 17-18 tahun sebesar 20,74 persen dan usia kurang dari 16 tahun sebanyak 15,48 persen (Kemen. PPPA, 2020a). Kepedulian terhadap kesehatan reproduksi perempuan masih sangat diperlukan karena kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang sangat tinggi, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya praktik perkawinan usia anak pada perempuan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan masih sangat rendahnya jumlah pengguna alat kontrasepsi pada laki-laki. Pada ibu hamil dan anak usia dibawah usia dua tahun, akses mendapatkan layanan kesehatan dasar juga sangat sulit, hal ini dapat meningkatkan kerentanan resiko pertumbuhan janin/bayi *stunting* (Bappenas, 2018).

Di bidang ekonomi kesenjangan gender masih terjadi terutama pada partisipasi angkatan kerja dan upah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki dan Dalam sepuluh tahun terakhir, TPAK perempuan tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 2019, TPAK perempuan hanya sebesar 51,89 persen, jauh tertinggal dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 83,13 persen. Diskriminasi pada upah pekerja perempuan masih terjadi. Perempuan yang bekerja masih menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki meskipun sama-sama dalam tingkat pendidikan yang setara. Rasio rata-rata antara upah perempuan dan laki-laki yang bekerja di tahun 2019 hanya sebesar 77,39 persen (Kemen. PPPA, 2020a). Diskriminasi upah pada perempuan juga terjadi di dunia global, dalam data UNDP, perempuan hanya mendapatkan 77 sen dari setiap dolar yang diperoleh laki-laki dalam pekerjaan yang sama (www.undp.org, 2020b).

Berbagai persoalan ketimpangan gender terjadi bukan hanya karena pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan masalah gender, namun tantangan pembangunan di Indonesia masih dihadapkan pada praktik budaya yang sebagian diantaranya belum berpihak pada kesetaraan gender. Harapan sekolah pada perempuan yang cukup tinggi sulit dipenuhi karena masih

terdapat budaya di masyarakat yang menganggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, mitos pendidikan menyebabkan perempuan menjadi perawan tua, tabunya Pendidikan tentang seksualitas, dan bahkan karena kondisi ekonomi dan sosial menyebabkan anak perempuan terpaksa harus menikah di usia sekolah. Kesehatan reproduksi perempuan juga masih banyak bergantung pada proses pengambilan keputusan pihak lain, akibatnya akses pada layanan kesehatan yang ada menjadi tidak bermakna, sementara tanggung jawab kesehatan keluarga secara budaya masih dibebankan sepenuhnya kepada perempuan.

Di bidang ekonomi, partisipasi angkatan kerja perempuan masih dihadapkan pada dilema antara tuntutan budaya untuk bertanggung jawab di ranah domestik (keluarga) atau pengembangan potensi diri untuk berperan di ruang publik atau pasar kerja. Konstruksi budaya yang masih menempatkan perempuan untuk bisa membagi waktu melakukan kerja-kerja reproduksi di rumah mempengaruhi pilihan pekerjaan yang tidak bisa seleluasa laki-laki. Data BPS menunjukkan menurut status pekerjaan utama antara perempuan dan laki-laki masih terjebak dengan cara pandang pada stereotip peran gender. Pada jenis pekerjaan yang berbasis pengasuhan dan perawatan masih didominasi oleh perempuan, sedangkan jenis pekerjaan yang dinilai maskulin menjadi ranah mayoritas laki-laki (Kemen. PPPA, 2020a). Sekelumit data ini menunjukkan konstruksi budaya yang belum berkesetaraan gender masih menjadi tantangan pembangunan manusia di Indonesia.

Perubahan cara pandang yang mengedepankan kesetaraan gender penting dilakukan dalam pembangunan manusia karena akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Upaya mengarusutamakan pembangunan manusia berbasis gender tidak dapat dihindari jika kemajuan bangsa dan keadilan sosial menjadi visi bangsa. Selain kualitas bangsa yang berdaya saing, peningkatan sumber daya manusia berbasis gender juga diperlukan agar cara pandang dan perspektif seluruh elemen bangsa tidak lagi melihat perempuan sebagai sumber masalah dan obyek pembangunan, dan tidak lagi memposisikan perempuan secara subordinat dan marginal dalam sistem pembangunan. Cara pandang yang merendahkan perempuan ini dapat melanggengkan praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender, baik dalam bentuk pembatasan, pengurangan, maupun penghilangan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara. Kerentanan perempuan menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuknya semakin beresiko. Jika tidak diintervensi, maka situasi ini menjadi hambatan nyata dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Dalam pembangunan manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi bagian yang integral dan tidak dapat dipisahkan.

Kesenjangan gender yang masih terlihat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, harus direspon melalui langkah dan tindakan kongkrit dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan. Reformasi di bidang hukum, sistem dan budaya di masyarakat dilakukan secara simultan agar berbagai diskriminasi gender dapat dihentikan, terutama pada perempuan. Pembatasan atau pengurangan pada akses, peluang, dan pilihan pada perempuan berpengaruh pada tingkat partisipasi dan kontrol perempuan dalam memajukan kapasitas dan potensi dirinya. Akibatnya, kemajuan yang dicapai perempuan menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan tidak dapat memaksimalkan potensi dirinya dan menjalani kehidupan dengan standar hidup dan keberdayaan yang penting bagi perkembangan kemanusiaan dan pembangunan negara.

Kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan manusia telah terlihat dalam berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia. Selain melakukan ratifikasi terhadap sejumlah konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dan *Beijing Declaration and Platform for Action (BDPA)*, pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan sejumlah kebijakan dan undang-undang untuk penghapusan berbagai diskriminasi gender dan pembangunan manusia berbasis gender. Dokumen perencanaan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kesenjangan dan diskriminasi gender. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka memastikan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang setara dan adil gender.

2.2.2 Kesetaraan Gender Menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan manusia Indonesia berbasis gender diperkuat melalui turut sertanya Negara Indonesia dalam memenuhi target pembangunan di tingkat global. Setelah *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015, saat ini Indonesia sedang menjalankan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs). Terdapat 17 tujuan utama yang disepakati dalam SDGs yang lahir pada tahun 2012 melalui pertemuan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ini ditargetkan dapat tercapai dalam 15 tahun atau di tahun 2030 (www.undp.org, 2020a).

Melalui SDGs, PBB terus mendorong semua negara anggota mengarahkan tujuan pembangunan yang dapat diukur dan disepakati secara universal. Terdapat 17 SDGs yang disepakati dan disadari sebagai tujuan yang saling terintegrasi. Artinya, setiap bidang dalam tujuan pembangunan merupakan saling memengaruhi capaian pada bidang lainnya. Pembangunan berkelanjutan harus menyeimbangkan keberlajutan sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga dapat memastikan semua orang menikmati hasil pembangunan secara merata. Dalam SDGs, prinsip *Leave No One Behind* (Jangan Meninggalkan Seorang pun) mengarahkan percepatan pembangunan menuju nol kemiskinan, diskriminasi dan pengecualian, mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan yang dapat membuat orang tertinggal dan kehilangan potensinya (UNSDG, 2020).

Gambar 2.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)



SDGs memuat 17 tujuan yang terbagi ke dalam 169 target. Pembangunan berbasis gender tercantum secara eksplisit dalam tujuan ke-5, "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan dan Anak". Adanya tujuan kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan SDGs menguatkan urgensi kesetaraan gender dalam pembangunan manusia. Kemajuan suatu negara tidak dapat dicapai tanpa adanya kesetaraan gender. Hal ini tampak menjadi kesadaran seluruh bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk memastikan segala diskriminasi berbasis gender harus diakhiri agar kemajuan negara melalui pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Di dalam tujuan ke-5, SDGs menetapkan sejumlah target capaian yang menjadi indikator keberhasilan dari tujuan kesetaraan gender, yaitu (www.un.org, 2020):

1) Mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimanapun

2) Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual dan berbagai jenis eksploitasi lainnya
3) Menghapus kan semua praktik berbahaya, seperti anak, pernikahan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin wanita
4) Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional
5) Menjamin partisipasi penuh dan efektif serta kesempatan yang sama bagi perempuan untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat
6) Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan dan Platform Aksi Beijing serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.
7) Melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama atas sumber daya ekonomi, serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lainnya, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
8) Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan
9) Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang kuat dan perundang-undangan yang dapat ditegakkan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan

Selain secara eksplisit menjadi bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender juga terintegrasi secara implisit dalam sejumlah tujuan SDGs lainnya. Pada tujuan terkait penghapusan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan yang berkualitas, kesehatan dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, ekonomi, industri, dan lingkungan, isu gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sejumlah tujuan SDGs tersebut hanya dapat dicapai secara maksimal jika kesetaraan gender terimplementasi di dalamnya. Merujuk pada 17 tujuan SDGs, terdapat sembilan tujuan SDGs yang memiliki keterkaitan erat dengan tujuan ke-5, kesetaraan gender, yaitu:

1) Tujuan 1: “Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat” Pada tujuan 1 ini, target capaian yang terkait langsung dengan kesetaraan gender adalah: 1) mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, 2) menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dan 3) Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.
2) Tujuan 2: “Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan”. Pada tujuan ke-2, kesetaraan gender terefleksi pada komitmen target untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
3) Tujuan 3: “Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia”. Pada tujuan ke-3, kesetaraan gender terfokus pada 2 target, yaitu 1) mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup dan 2) menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
4) Tujuan 4: “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”. Pada tujuan ke-4, terdapat lima target yang terkait erat dengan kesetaraan gender, yaitu 1) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, 2) menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, 3) menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, 4)

menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dan 5) menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

5) Tujuan 6: “Menjamin Ketersediaan Serta Pengolaan Air Bersih dan Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua”. Pada tujuan ke-6, penegasan pentingnya kesetaraan gender terlihat pada dua target, yaitu 1) populasi menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman dan 2) Penduduk memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.
6) Tujuan 8: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Pada tujuan ke-8, perhatian terhadap kesenjangan ekonomi perempuan terefleksi pada 2 target capaian, yaitu 1) mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dan 2) melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
7) Tujuan 9: “Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi”. Target dari tujuan ke-9 yang terkait dengan kesetaraan gender terdapat pada target penduduk menggunakan telepon genggam dan internet (termasuk perempuan).
8) Tujuan 10: ”Mengurangi Kesenjangan Intra-Dan Antarnegara”. Tujuan ke-10, kesetaraan gender terefleksi pada 2 target, yaitu 1) memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, disabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya, dan 2) menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
9) Tujuan 11: “Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”. Pada tujuan ke-11, kesetaraan gender secara tegas disebutkan dalam target untuk menyediakan ruang publik dan ruang

terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan global ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 4 Juli 2017 dan kebijakan pendukungnya. Pada pasal 4 ditetapkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengemban amanat dalam Menyusun Peta Jalan Nasional RAN TPB dan RAN TPB (Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, 2017). Untuk memastikan capaian SDGs, pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Nasional SDGs yang bertugas memastikan upaya-upaya capaian SDGs dapat disinergikan dalam pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Tim ini terdiri dari tiga unsur utama, yaitu pemerintah, pakar, dan pelaksana yang bekerja untuk empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola.

2.2.3 Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan dalam RPJMN 2019 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 secara tegas menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu pertimbangan mendasar dalam penyusunan rencana pembangunan di Indonesia. Sumber Daya manusia (SDM) diposisikan sebagai modal utama dalam pembangunan nasional sehingga kualitas SDM menjadi prioritas utama pembangunan. Untuk mengukur capaian kesetaraan gender, RPJMN menggunakan tiga indikator yang telah disepakati secara global, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Dalam memastikan kesetaraan gender terintegrasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah menyadari adanya sejumlah tantangan dalam pembangunan SDM. Selain itu, dalam RPJMN 2019 – 2024, pemerintah menetapkan target bahwa pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat mencapai 91,39 sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dapat mencapai 74,18. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategi yang dituangkan dalam RPJMN sebagai berikut :

1) Penguatan kebijakan dan regulasi
2) Percepatan pelaksanaan PUG di kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan

pelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

3) Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha
4) Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan
5) Peningkatan jejaring dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dunia usaha, dan lembaga masyarakat.

2.2.4 Kesetaraan Gender Sebagai Tujuan dalam Rencana Strategis Kementerian PPPA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) merupakan kementerian yang secara khusus membidangi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Amanat utama yang diemban Kemen PPPA adalah memastikan penyelenggaran pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terintegrasi dalam seluruh bidang pembangunan di Indonesia. Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Kemen PPPA mempromosikan PUG dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan sehingga tujuan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN dapat diimplementasikan secara terintegrasi antar lembaga/ kementerian.

Dalam mewujudkan visi pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong rotong, Kemen PPPA mendorong terciptanya 4 kondisi pembangunan, yaitu 1) kesetaraan gender, 2) keadilan gender, 3) perlindungan perempuan, dan 4) pemenuhan hak anak. Sebagai langkah kongkrit, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Presiden RI, Kemen PPPA menekankan pada lima (5) isu prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai wujud kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu 1) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) peningkatan peran ibu dalam pendidikan anak, 3) penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) penurunan pekerja anak dan 5) pencegahan perkawinan anak. Di seluruh kebijakan dan program yang diimplementasikan, terdapat prinsip dasar pembangunan manusia yang dikenal dengan Program Three Ends yaitu: 1) Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; 2) Akhiri Perdagangan Manusia; dan 3) Akhiri Ketidakadilan Akses Ekonomi Untuk Perempuan.

Penguatan kelembagaan PUG menjadi salah satu komponen penting yang dapat mengawal proses pembangunan berkesetaraan gender. Kelembangaan PUG dibentuk di setiap tingkat pemerintahan pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, setiap kementerian memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang bertugas mengawal kebijakan, program dan kegiatan nya berkesetaraan gender, begitu juga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dimana Pokja PUG yang diketuai oleh Kepala Bappeda. Di tingkat masyarakat, Kemen PPPA mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi serta mendukung upaya dan program untuk peningkatan kesetaraan gender. Partisipasi masyarakat dibagi dalam empat kelompok, yaitu 1) partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, 2) partisipasi media, 3) partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, akademisi dan lembaga riset. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat: 1) Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan perlindungan anak. 2) Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) Mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui fasilitasi dan kerjasama; dan 4) Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.3 Tinjauan Kebijakan

2.3.1 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

Melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Presiden mengamanatkan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/ Walikota untuk melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

1) Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing
2) Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
3) Menteri Pemberdayaan Perempuan:

- Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

4) Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

2.3.2 Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bandung Barat

Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak - haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Di Kabupaten Bandung Barat, pengarusutamaan gender diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Teknis Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk :

1) Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;
2) Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki
3) Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara
4) Mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender

5) Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, serta tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
6) Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

Dalam proses perencanaan, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui analisis gender yang digunakan menggunakan metode *Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway)* atau metode analisis lain yang dilakukan oleh masing - masing PD. Hasil dari analisis gender ini dituangkan dalam penyusunan PAG (Pernyataan Anggaran Gender) yang menjadi dasar PD dalam menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA PD. Selanjutnya Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra dan Renja PD yang responsif gender.

Pada tahap pelaksanaan, dibentuk Pokja PUG sebagai upaya percepatan pembentukan lembaga pengarusutamaan gender pada PD yang terdiri dari Kepala Bappeda selaku ketua, Kepala BP3AKB sebagai sekretaris, dan anggota PUG yaitu kepala/ pimpinan PD di lingkungan Pemerintah Daerah. Pokja ini mempunyai tugas yaitu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

Selain itu, Pokja PUG mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing PD
2) Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG
3) Penyusunan program kerja tahunan
4) Mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender
5) Penyusunan rencana kerja Pokja PUG Daerah setiap tahun
6) Perumusan rekomendasi kebijakan kepada Bupati/Walikota
7) Penyusunan profil gender Daerah
8) Pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD
9) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, yang memuat :

a) PUG dalam produk hukum Daerah
b) PUG dalam siklus pembangunan Daerah
c) Penguatan kelembagaan PUG di Daerah
d) Penguatan peran masyarakat di Daerah

10) Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di masing-masing PD.

Selain itu, dalam rangka pengarusutamaan gender pada PD, dibentuk *Focal Point* PUG yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program. *Focal Point* PUG mempunyai tugas melaksanakan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.

2.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023

A. Visi dan Misi Kabupaten Bandung Barat

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

"Bandung Barat yang AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius), berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia".

Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi Bandung Barat yang Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius, dengan pengertian sebagai berikut :

1. **Aspiratif.** Pemerintah Bandung Barat yang aspiratif akan selalu mendengarkan dan menghargai menghargai harapan, keinginan, cita-cita, dan kemampuan masyarakat, sehingga kemudian pemerintahan dijalankan dengan berpihak pada kebutuhan dan suara masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan suaranya secara langsung, dan juga dapat melalui perwakilannya di DPRD maupun lembaga lainnya seperti lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan
2. **Kreatif.** Penyelenggaraan pemerintahan di Bandung Barat dilaksanakan dengan terobosan dan menggunakan gagasan yang out of the box dan orisinil dalam rangka memenuhi kepentingan masyarakat melalui melalui pembangunan yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku

3. **Unggulan.** Bandung Barat harus diarahkan agar memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan potensi yang ada untuk bersaing, memiliki kekelebihan komparatif dan kompetitif. Dalam konteks pembangunan Kabupaten Bandung Barat sarana prasarana dibangun dengan kualitas baik, SDM pengelola yang berkualitas, pelayanan yang diberikan dengan kualitas terbaik, dan produk yang dihasil unggul secara kualitas dan dapat bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional
4. **Religius.** Masyarakat Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki dan terikat dengan nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama. Nilai, norma dan semangat keagamaan ini harus senantiasa menjiwai, mewarnai dan menjadi ruh atau jiwa bagi seluruh aktivitas kehidupan, termasuk pembinaan sumberdaya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pelaksanaan pembangunan. Kehidupan bermasyarakat di Bandung Barat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama, serta berbhineka tunggal ika

Visi tersebut di atas hanya akan tercapai dalam 5 (lima) tahun ke depan jika seluruh birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta dengan didukung oleh stakeholder pembangunan lainnya bekerja secara cepat, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya RPJMD ini diharapkan bisa lebih kreatif, inovatif serta tidak lagi "*business as usual*".

Misi pembangunan Kabupaten Bandung Barat 2018 – 2023 diarahkan untuk memanfaatkan seluruh potensi daerah yang ada, dengan fokus untuk pengembangan agroindustri dan wisata ramah lingkungan dalam rangka menghasilkan pembangunan yang berkualitas menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera. Misi pembangunan ini tetap dalam kerangka pelaksanaan prioritas pembangunan periode 2018 – 2023 pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat 2007 – 2025.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan di atas, dengan menggunakan dasar pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka misi pembangunan Bandung Barat 2018 – 2023 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas
2. Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi

Prinsip-prinsip sebagaimana janji Bupati terpilih yang digunakan sebagai dasar penyusunan misi ini adalah Kabupaten Bandung Barat yang mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

- Membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas melalui jaminan akses dan pemerataan terhadap layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan keagamaan
- Memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar sebagai penunjang mobilitas masyarakat dan pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya
- Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis kearifan lokal dan kreativitas
- Melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya untuk pengembangan pariwisata ramah lingkungan
- Menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri yang merata melalui optimalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi
- Mengurangi kesenjangan masyarakat dengan kebijakan yang *pro-poor, pro-job, progrowth,* dan *pro-environment*
- Mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif dan melayani berbasis inovasi dan teknologi

Selain itu, untuk mencapai yang diharapkan dari misi tersebut, ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator pada masing – masing misi.

Misi 1 : Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

bappelitbangda

Tabel II.2 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-1

Misi I	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Indeks Pendidikan
		Meningkatnya Minat Budaya Baca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan
	2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan
			Total Fertility Rate
	3. Meningkatkan pemenuhan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan dan Non Dasar Lainnya	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan (PPH)
		Meningkatanya Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yg dilestarikan
		Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketentraman dan ketertiban
			Indeks Peningkatan Respon Penanganan Bencana Kebakaran & Penyelamatan
		Meningkatkan sinergitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah
		Mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh kelompok di masyarakat	Persentase Angka PPKS yang Tertangani
			Indeks Kerukunan Umat Beragama
			Tingkat Pemahaman Politik Masyarakat

bappeldabangda

Misi I	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas	4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa Aktif
			Persentase Desa Mandiri
		Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	Presentase Layanan Kepemudaan
			Indeks Pembangunan Olahraga
		Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)
			Kabupaten/Kota Layak Anak

Misi 2 : Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing

Tabel II.3 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-2

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Mewujudkan agroindustri dan pariwisata sebagai sektor unggulan beserta sektor dan potensi sumber daya lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan dan berdaya saing	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Pertumbuhan Sektor Pertanian
			Persentase Kenaikan Produksi Peternakan
			Persentase Kenaikan Produksi Budidaya Perikanan
			Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan
			Jumlah Kunjungan Wisatawan
			Persetasi Pertumbuhan Ekonomi terhadap sektor pariwisata
		Meningkatnya investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN
			Jumlah Investor PMDN
		Meningkatnya partisipasi tenaga kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

bappeltbangda

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
		setempat di kegiatan ekonomi yg ada	Persentase terselesaikannya perselisihan hubungan industrial yang terdaftar
		Meningkatnya pertumbuhan koperasi, usaha mikro, wirausaha dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Koperasi Sehat
			Penumbuhan Wirausaha Baru

Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi

Tabel II.4 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-3

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur fisik sosial, dan ekonomi	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi dan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur ekonomi, kawasan perkotaan dan pusat kegiatan di perdesaan, melalui berbagai alternatif skema pembiayaan	Indeks Kesulitan Geografis
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sosial	Persentase penduduk yang terlayani oleh sistem prasarana sosial
	Meningkatkan kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi

Tabel II.5 Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Pada Misi Ke-4

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien	Indeks Merit
			Nilai SAKIP
			Opini BPK
			Indeks SPBE
	Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari ke-4 misi ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berada pada misi ke-1 khususnya pada tujuan ke-4 yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, sehingga setelah tujuan, sasaran strategis, dan indikator sasaran dirumuskan, selanjutnya dituangkan juga dalam srategi dan arah kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.6 Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi Ke-1

TUJUAN	SASARAN / INDIKATOR SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 1	**Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat luas lainnya dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas**			
Tujuan 1.4 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	1.4.1	Meningkatnya pemberdayaan desa dan lembaga masyarakat, dengan indikator : a. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif b. Persentase Desa Mandiri	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)	1. Meningkatan Penyediaan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.
	1.4.2	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat, dengan indikator : a. Persentase layanan kepemudaan b. Indeks pembangunan olahraga	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)	1. Menyediakan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.
	1.4.3	Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan gender, pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak , dengan indikator : a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b.Indeks pemberdayaan gender (IDG) c. Kabupaten/Kota Layak Anak	Menyediakan sistem perlindungan sosial, jaminan akses bagi seluruh masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah secara merata, serta menciptakan lingkungan sosial yang tertib, serta patuh terhadap hukum (S5)	1. Meningkatan sistem perlindungan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan.

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG BARAT



bappelitbangda

BAB III
PENDEKATAN & METODOLOGI



BAB III
PENDEKATAN DAN METODOLOGI

3.1 Pendekatan

3.1.1 *Mixed Scanning Planning Approach*

Pendekatan *Mixed Scanning Planning Approach*, pada dasarnya kajian sistem yang lebih makro tetap menjadi bagian dari kajian sistem yang lebih mikro, walaupun tidak secara menyeluruh. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dengan melakukan pendekatan ini maka kajian yang dilakukan menjadi lebih lengkap, karena mempertimbangkan keseluruhan sistem yang mempengaruhi, baik sistem eksternal maupun internal.

Secara teoritis, sebenarnya terdapat 3 pendekatan perencanaan sejalan dengan perkembangan pemahaman akan perencanaan, yaitu *rational comprehensive approach*, Yang secara konseptual dan analitis mencakup pertimbangan perencanaan yang luas, dimana dalam pertimbangan luas tersebut tercakup berbagai unsur atau subsistem yang membentuk sistem secara menyeluruh. Meyerson Banfield mengidentifikasi terdapat 4 ciri utama pendekatan perencanaan rasional menyeluruh, yaitu:

- Dilandasi oleh suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan yang utuh.
- Didasari oleh seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh, dan terpadu.

- Peramalan yang tepat serta ditunjang oleh sistem informasi (masukan data) yang lengkap, andal, dan rinci.
- Peramalan yang diarahkan pada tujuan jangka panjang.

Namun demikian, pendekatan ini ternyata banyak dikritik karena dianggap memiliki kelemahan-kelemahan seperti produk yang dihasilkan dirasakan kurang memberikan informasi dan arahan yang relevan bagi stakeholders, cakupan seluruh unsur dirasakan sukar direalisasikan, dukungan sistem informasi yang lengkap dan andal biasanya membutuhkan dana dan waktu yang cukup besar, serta umumnya sistem koordinasi kelembagaan belum mempan dalam rangka pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan yang rasional menyeluruh.

1. Pendekatan Perencanaan Terpilah atau *Disjointed Incremental Planning Approach*, Muncul sebagai tanggapan dari ketidakefektifan perencanaan dengan pendekatan rasional menyeluruh. Dikemukakan oleh Charles E. Lindblom, dkk, pendekatan ini memiliki 3 ciri utama, yaitu:
   - Rencana terpilah tidak perlu ditunjang oleh penelaahan serta evaluasi alternatif rencana secara menyeluruh.
   - Hanya mempertimbangkan bagian-bagian dari kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur atau subsistem yang diprirotiaskan.
   - Dengan terbatasnya lingkup perencanaan, yaitu pada unsur atau subsistem tertentu saja, maka ada anggapan bahwa pelaksanaan menjadi lebih mudah dan realistik.

   Namun ternyata, pendekatan ini juga masih memiliki kelemahan-kelemahan, seperti karena kurang berwawasan menyeluruh sering terjadi dampak ikutan yang tidak terduga sebelumnya, dianggap hanya merupakan usaha penyelesaian jangka pendek yang kurang mengkaitkan dengan sasaran dan tujuan jangka panjang, serta dianggap sebagai penyelesaian permasalahan secara “tambal sulam” yang bersifat sementara sehingga harus dilakukan secara terus menerus (tidak efisien).

2. Pendekatan Terpilah Berdasarkan Pertimbangan Menyeluruh atau *Mixed Scanning Planning Approach* atau *Third Approach* (Amitai Etzioni), yang merupakan kombinasi antara pendekatan rasional menyeluruh dengan pendekatan terpilah, yaitu menyederhanakan pendekatan menyeluruh dalam lingkup wawasan secara sekilas dan memperdalam tinjauan atas unsur yang strategis terhadap permasalahan menyeluruh. Ciri utama pendekatan perencanaan ini adalah:

Perencanaan mengacu pada garis kebijakan umum yang ditentukan pada tingkat tinggi;

- Perencanaan dilatar belakangi oleh suatu wawasan menyeluruh serta memfokuskan pendalaman penelaahan pada unsur-unsur yang diutamakan;
- Ramalan mendalam menyangkut unsur yang diutamakan dilandasi oleh ramalan singkat tentang lingkup menyeluruh dan didasarkan pada wawasan sistem;
- Dinilai sebagai penghematan waktu dan dalam lingkup penelaahan, analisis, serta proses teknis penyusunan rencana karena terdapat penyederhanaan dalam penelaahan dan analisis makro; dan
- Untuk menunjang hasil ramalan dan analisis sekilas, maka proses pemantauan, pengumpulan pendapat, komunikasi, dan konsultasi dengan masyarakat yang berkepentingan dan pemerintah dilakukan secara menerus mulai dari perumusan sasaran dan tujuan rencana pembangunan.

Dengan pendekatan *Mixed Scanning Planning Approach*, maka secara lebih substantif, pendekatan dalam pekerjaan ini dapat dibagi atas:

- Pendekatan eksternal, yang berarti bahwa dalam pekerjaan ini dipertimbangkan faktor-faktor determinan yang dianggap mempengaruhi dalam penentuan arah pengembangan, seperti kebijakan-kebijakan yang mengikat atau harus diacu, kondisi dinamika global, dan lain-lain. Dari pendekatan ini nantinya akan teridentifikasi gambaran tentang peluang yang tercipta dan tantangan yang harus dijawab dalam kebijakan dan strategi peningkatan IPG dan IDG.
- Pendekatan internal, yang berarti bahwa dalam pekerjaan ini dipertimbangkan faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh, seperti kondisi fisik dan lingkungan, kependudukan, perekonomian, kelembagaan, dll. Pendekatan ini terkait dengan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang akan dihadapi dalam penentuan dalam kebijakan dan strategi peningkatan IPG dan IDG suatu wilayah.

3.1.2 Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang bersifat membandingkan. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

Menurut Nazir (2005: 58) pendekatan komparatif adalah sejenis pendekatan deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya

suatu fenomena tertentu. Jadi pendekatan komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

Tujuan pendekatan komparatif yaitu :

- Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.
- Untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tentu.
- Untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.
- Untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

3.1.3 *Participatory Approach*

Pendekatan *participatory* digunakan untuk memperoleh urutan prioritas pengembangan dan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders* untuk melengkapi hasil analisis. Selain melalui penyebaran kuesioner dan wawancara, pendekatan *participatory* ini juga dilakukan dengan melalui pembahasan-pembahasan/seminar-seminar untuk mengkaji lebih lanjut hasil analisis yang dibuat. Pertimbangan menggunakan *participatory approach* adalah, bahwa saat ini pemaksaan kehendak dan perencanaan dari atas sudah tidak relevan lagi. Di era reformasi ini perlu melibatkan berbagai pihak dalam setiap kegiatan pembangunan. Manfaat penggunaan pendekatan tersebut adalah untuk meminimalkan konflik berbagai kepentingan yang berarti juga mendapatkan hasil akhir yang menguntungkan untuk semua pihak. Keuntungan lainnya yang akan diperoleh adalah jaminan kelancaran implementasi hasil kajian ini di kemudian hari.

Sepenuhnya disadari bahwa penggunaan *participatory approach* akan menimbulkan berbagai persoalan dalam prosesnya, terutama masalah keterbatasan waktu. Masalah ini akan dicoba diminimalkan melalui persiapan materi dan metode survey yang optimal, sehingga kesepakatan dapat dengan segera dicapai tanpa mengurangi kebebasan stakeholders untuk mengeluarkan pendapatnya.

3.2 Metodologi

3.2.1 Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum tahap-tahap penyelesaian pekerjaan kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat,** sesuai dengan koridor ruang lingkup kajian dalam Kerangka Acuan Kerja meliputi:

(1) Tahap Persiapan Pekerjaan dan Inventarisasi Data Awal

Tahap persiapan dasar dan inventarisasi data awal kegiatan kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** merupakan tahap awal dari suatu perencanaan dan memuat kegiatan-kegiatan pokok berupa persiapan dan mobilisasi, pengumpulan data awal, kajian awal data sekunder, serta penyiapan desain/pedoman survey

a. Persiapan dan Mobilisasi

Tahap persiapan dan mobilisasi kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** merupakan tahap awal dari suatu perencanaan dan memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pemahaman KAK

   Kerangka Acuan Kerja yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** harus dipahami dengan baik oleh pihak konsultan sehingga seluruh proses pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

2. Penyelesaian administrasi pekerjaan

3. Persiapan peralatan dan personil

   Persiapan peralatan dilakukan pada tahap awal, baik peralatan untuk kepentingan survey lapangan maupun peralatan untuk pekerjaan studio/ kantor. Sedangkan kantor diperlukan sejak dimulainya pekerjaan baik untuk penyusunan laporan maupun untuk koordinasi para tenaga ahli yang dibantu oleh staf kantor baik dalam persiapan survey maupun dalam penyusunan program kerja.

4. Penyusunan dan penajaman pendekatan metodologi studi

   Penyusunan pendekatan dan metodologi dijabarkan dalam bentuk naratif serta bagan alir yang mencakup seluruh tahapan kegiatan yang akan dilakukan.

bappeltbangda

Dalam penyusunan metode analisis yang dilakukan diadaptasi berdasarkan ketersediaan data, informasi yang didapatkan dari hasil survey sekunder/kegiatan yang telah dilakukan oleh dinas lain.

5. Penyusunan detail rencana kerja

   Penyusunan rencana kerja dilakukan agar rangkaian tahapan proses pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih terarah sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran pekerjaan.

6. Kegiatan persiapan/perijinan

   Perijinan dilakukan sebagai persiapan awal untuk melakukan survei ke lokasi kegiatan.

7. Inventarisasi dan persiapan perangkat survey

   Persiapan peralatan meliputi peralatan untuk kepentingan survei lapangan.

8. Mobilisasi tim

   Kegiatan mobilisasi tim (tenaga ahli) dilakukan pada tahap awal dimaksudkan untuk mendapatkan tenaga ahli sesuai dengan yang diminta (sesuai KAK) dengan kualitas memadai, disamping itu untuk mempercepat koordinasi antar tenaga ahli, agar tenaga ahli tersebut mampu berkomunikasi dan bekerjasama dalam pelaksanaan pekerjaan, hal ini dikarenakan informasi dari setiap tenaga ahli diperlukan oleh tenaga ahli lainnya.

b. Pengumpulan Data Awal

Kegiatan ini dilakukan terutama pada pengumpulan data yang bersifat data sekunder yang datanya banyak beredar di dinas terkait maupun lembaga non pemerintah ataupun data-data yang sudah terpubliksi. Beberapa data yang dikumpulkan pada tahap ini diantaranya sebagai berikut:

1. ***Review* terhadap regulasi/ kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG).** *Review* dilakukan terhadap kebijakan dan program terkait dengan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat.**
2. ***Tinjauan literatur***, mencakup tinjauan terhadap teori-teori yang terkait dengan pekerjaan, seperti teori evaluasi, teori penyusunan kriteria, serta studi-studi dan proyek yang pernah dilakukan yang menyangkut perumusan kebijakan dan strategi dalam peningkatan IPG dan IDG.

c. Kajian Data Awal

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada tahap awal, dilakukan kajian awal terhadap data-data sekunder tersebut.

d. Penyiapan Desain/Pedoman Survey

Rencana kerja yang telah dimantapkan berdasarkan penyempurnaan kerangka pikir pelaksanaan pekerjaan yang telah dibuat, dipakai dasar dalam penyusunan Desain *Survey*. Pada kegiatan perumusan desain *survey* ini, sekaligus dipersiapkan alat-alat bantu (*tools*) yang dipergunakan dalam kegiatan *survey*, serta penyiapan *sampling*. Alat-alat bantu yang telah dipersiapkan untuk kegiatan *survey* dapat dilihat di Lampiran. Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pokok, meliputi:

- Penyiapan peta dasar; Peta dasar diperlukan sebagai data spasial untuk mengetahui kondisi wilayah perencanaan sesuai dengan kebutuhan.
- Penyusunan kebutuhan data dan narasumber
- Penyiapan peralatan dan perlengkapan survey
- Alokasi waktu dan biaya

e. Penyusunan alokasi waktu dan biaya diperlukan agar waktu dan biaya yang tersedia dapat digunakan seefektif dan sebaik mungkin.

(2) Tahap Survei/Pengumpulan Data, Tabulasi & Kompilasi Data, dan Identifikasi serta Rencana

Pada dasarnya pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan pokok meliputi:

a. Pelaksanaan Survei/Pengumpulan Data
b. Tabulasi dan Kompilasi Data
c. Identifikasi dan Analisis data

Adapun rincian masing-masing kegiatan, dijelaskan pada pembahasan berikut:

A. Pelaksanaan Survey

Pelaksanaan survey ini terdiri dari :

- Survei Instansional

  Survei instansional atau biasa disebut survei data sekunder kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** meliputi pencarian data mengenai kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) yang berpengaruh dalam proses penyusunan dokumen ini, antara lain **data**

bappelitbangda

jumlah penduduk, data perekonomian masyarakat, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, data anggota DPRD.

- Survei Lapangan

  Survei lapangan kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** meliputi observasi langsung di lapangan untuk melihat wilayah perencanaan terkait dengan sebaran dan kondisi **perekonomian dan pendapatan masyarakat baik itu laki – laki maupun perempuan**.

- Wawancara

  Wawancara/ *interview* dilakukan dengan pejabat/staf instansi terkait di wilayah kajian.

B. Tabulasi dan Kompilasi Data

Semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data dan survey kemudian dikompilasi. Pada dasarnya kegiatan kompilasi data ini dilakukan dengan cara mentabulasi dan mensistematisasi data-data tersebut dengan menggunakan cara komputerisasi. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya data dan informasi yang telah diperoleh sehingga akan mempermudah pelaksanaan tahapan selanjutnya yaitu tahap analisis. Tahapan kegiatan kompilasi data meliputi pokok-pokok pekerjaan dan hasil yang diharapkan antara lain:

- ❒ Mentabulasi dan mensistematisasikan fakta dan informasi sesuai keperluan, sehingga mudah dibaca dan dimengerti.
- ❒ Tersusunnya data dan informasi sesuai dengan tematik kebutuhan perencanaan

3.2.2 Metoda Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan hasil dari proses pengumpulan data dan informasi yang didapat. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

A) Metoda Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara turun langsung ke objek/ lokasi studi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, asli, aktual, dan data yang belum tersedia atau kurang dari data sekunder yang didapatkan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengisian kuisioner, wawancara, media informasi dan/atau melalui forum diskusi dan konsultasi

publik.

B) Metode Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder sering juga disebut studi kepustakaan atau studi dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui kajian terhadap dukumen-dokumen, teori-teori dan konsep-konsep yang ada kemudian diambil sebagai data yang diperlukan dalam proses pekerjaan. Hal ini berarti bahwa dalam pengumpulan data sekunder, konsultan memperoleh data dari pihak lain atau biasa juga disebut data tangan kedua. Data sekunder dikumpulkan dengan cara melakukan kaji ulang dokumentasi, yaitu data sekunder yang merupakan dokumen resmi/hasil kajian yang menyajikan informasi tentang keadaan, aturan, pedoman, standar dan sebagainya baik yang diterbitkan oleh internal maupun eksternal dilingkungan pelaksana pekerjaan. Data dan informasi kegiatan **Penyusunan Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Bandung Barat** yang sekurang-kurangnya meliputi data jumlah penduduk, data perekonomian masyarakat, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, data anggota DPRD.

3.2.3 Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan berbagai pendekatan, baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Analisis yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan untuk tercapainya tujuan dan keluaran yang diinginkan dari kegiatan **data jumlah penduduk, data perekonomian masyarakat, angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, data anggota DPRD.** Adapun dalam penyusunan metode analisis, dilakukan terlebih kajian pustaka terkait data sekunder yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan data. Sehingga memungkinkan untuk adanya penyesuaian metode analisis yang digunakan, untuk melakukan *update* informasi maupun melakukan komparasi terhadap informasi yang dihasilkan kajian/dokumen sebelumnya.

Adapun beberapa teknik analisis yang dapat digunakan dalam penyusunan produk perencanaan ini antara lain sebagai berikut:

1. **Definisi & Pengertian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

Tahun 2010 hingga 2013 penghitungan IPG dihentikan dan pada tahun 2014, penghitungan IPG kembali dilakukan dengan menggunakan metode baru sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya. IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. IPG metode baru ini menggunakan rasio IPM perempuan

dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Gambar 3.1 Perkembangan dan Penyempurnaan IPG dan IDG



Sumber : Wisnujati, 2020

Perubahan IPG metode baru terjadi pada indikator yang digunakan dan metodologi pengitungannya, namun dimensi yang digunakan masih tetap sama dengan metode sebelumnya, yaitu: umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life);* pengetahuan *(knowledge);* dan standar hidup layak *(decent standard of living).*

2. Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

bappelitbangda

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

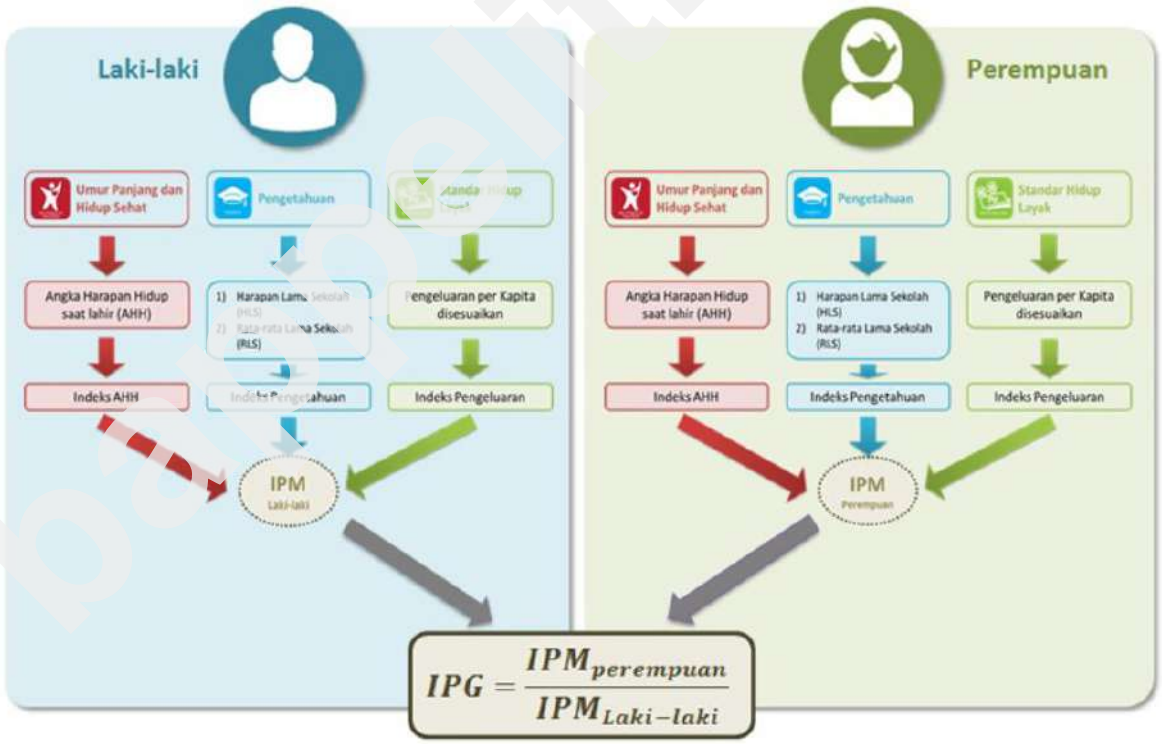
IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010.

Tabel III.1 Metodologi Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dimensi	Indikator	
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	IPG/GDI
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 3.2 Konsep Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel III.2 Perbedaan Metode Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

	Lama	Baru
Penghitungan	IPG = IPM tertimbang jenis kelamin	IPG = Rasio IPM perempuan dengan laki-laki
Interpretasi	• IPG harus dianalisis bersama IPM • Selisih IPG dg IPM merupakan gap capaian gender • Semakin mendekati angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki • Jika IPG = IPM, artinya tidak ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki	• IPG dapat diinterpretasikan sendiri • Semakin mendekati angka 100, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara perempuan dengan laki-laki • IPG < 100, capaian perempuan < capaian laki-laki • IPG = 100, capaian perempuan sama dengan laki-laki • IPG > 100, capaian perempuan > capaian laki-laki

Sumber : Badan Pusat Statistik

3. Analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG adalah indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selain itu IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Tabel III.3 Metodologi Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dimensi	Indikator	
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	IDG/GEM
Pengambilan keputusan	Proporsi pengambilan keputusan, Laki-Laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-2 & Perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

4. Analisis SWOT

SWOT (Strengthening, Weakness, Opportunity, Treatment atau Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) adalah metodologi yang populer untuk digunakan dalam banyak aspek dan sektor penganalisaan. SWOT mempunyai keunggulan antara lain : Dapat diaplikasikan di banyak bidang penelitian dan pekerjaan. Mudah dimengerti dan sederhana aplikasinya. Merupakan pendekatan kualitatif (David, 2004).

Hasil analisis SWOT sangat tergantung pada tingkat pengetahuan dan pemahaman penggunanya. Semakin detail pemahaman pengguna maka semakin tajam pula hasil analisisnya. SWOT akan menghasilkan rumusan masalah dan bahan untuk menentukan langkah-langkah penanganan

selanjutnya. Tujuan/Kegunaan Analisis SWOT: Untuk merumuskan strategi pengembangan wilayah dengan cara mengidentifikasi seluruh potensi, kendala, peluang-peluang dan hambatan-hambatan yang ada. Tahapan Analisis SWOT :

- Tahap pengumpulan data

  a) Identifikasi daftar kekuatan (strengths) internal (+)

  b) Identifikasi daftar kelemahan (weakness) internal (-)

  c) Identifikasi daftar peluang (opportunities) eksternal (+)

  d) Identifikasi daftar ancaman (threats) eksternal (-)

- Tahap analisis (matriks SWOT)

  a) Cocokkan kekuatan internal & peluang eksternal (strategi SO)

  b) Cocokkan kekuatan internal & ancaman eksternal (strategi ST)

  c) Cocokkan kelemahan internal & peluang eksternal (strategi WO)

  d) Cocokkan kelemahan internal & ancaman eksternal (strategi WT)

- Tahap pengambilan keputusan/perumusan strategi

  Prinsip Utama SWOT : Bagaimana strategi kita dalam memaksimalkan kekuatan (S) & peluang (O) ? Bagaimana strategi kita dalam meminimalkan kelemahan (W) & ancaman (T) ? Karakteristik strategi yang digunakan :

  a) Strategi SO:

     Strategi menggunakan kekuatan internal untuk meraih peluang-peluang sebesar-besarnya yang ada diluar (agresif)

  b) Strategi ST:

     Strategi menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman yang datangnya dari luar (diversifikasi)

  c) Strategi WO :

     Strategi mengurangi kelemahan-kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada diluar (peninjauan kembali)

  d) Strategi WT :

     Strategi mengurangi kelemahan-kelemahan internal dan menghindari ancaman yang ada diluar (defensif)

     Adapun prosedur analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- Tentukan variabel-variabel yang mempengaruhi, misalnya aspek kebijaksanaan dan arahan pada penyelanggaraan prasarana dan sarana

bappelitbangda

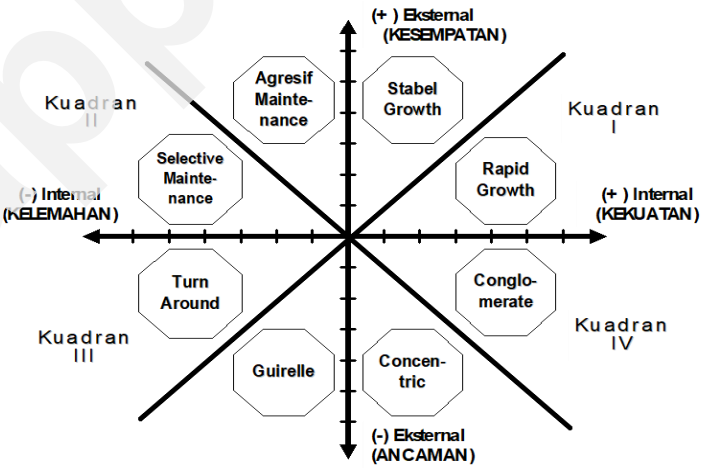
- Pilah-pilah variabel tersebut ke dalam empat kelompok, yaitu kelompok Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Pada proses ini sangat dibutuhkan kejelian pengguna dalam mengklasifikasikan variabel tersebut untuk disesuaikan dengan goals karena sebuah variabel dapat menjadi ancaman sekaligus sebagai peluang, tergantung dari cara pandang dan tujuannya.
- Setiap variabel yang dimasukkan sebagai Kekuatan diberikan label S1, S2, S3, … dan seterusnya. Demikian juga dengan Kelemahan (label W), Peluang (label O) dan Ancaman (label T)
- Kemudian pengguna mencoba mengkombinasikan setiap label, misalnya S1 dengan T1 (kekuatan 1 dengan ancaman 1) dan kemudian secara kualitatif dianalisis apa dampak dan pengaruhnya terhadap pencapaian. Demikian juga untuk kombinasi variabel lainnya. Disinilah dibutuhkan kejelian pengguna untuk mengkombinasikan setiap variabel, mengembangkannya sesuai tujuan dan merumuskan hasilnya.
- Kumpulan kesimpulan tersebut, kemudian dipilah sesuai prioritas dan besarnya pengaruh, sehingga diperoleh rumusan kesimpulan sebagai masukan pegambilan keputusan dan kebijakan

Tabel III.4 Matrik SWOT

	POTENSI S	PERMASALAHAN W
PELUANG PENGEMBANGAN O	OS	OW
TANTANGAN PENGEMBANGAN T	TS	TW

Sumber : David (2004)

Gambar 3.3 Matrik SWOT



Sumber : David (2004)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG BARAT



bappelitbangda

BAB IV
GAMBARAN UMUM



BAB IV
GAMBARAN UMUM

4.1 Administrasi

Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 41' - 07º 19' Lintang Selatan dan 107º 22' - 108º 05' Bujur Timur. Keseluruhan wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah sebesar 1.287,41 Km^2 atau 128.740,50 Ha yang terbagi menjadi 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling.

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 Kecamatan,165 desa dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur; Kecamatan (Maniis, Darangdan, Bojong dan Wanayasa) Kabupaten Purwakarta; Kecamatan (Sagalaherang, Jalan Cagak dan Cisalak) Kabupaten Subang.

b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan (Cilengkrang, Cimenyan, Margaasih dan Soreang) Kabupaten Bandung, Kecamatan (Cidadap dan Sukasari) Kota Bandung dan Kecamatan (Cimahi Utara, Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan) Kota Cimahi.

c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan (Campaka, Ciranjang, dan Mande) Kabupaten Cianjur.

d. Sebelah Selatan : Berbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

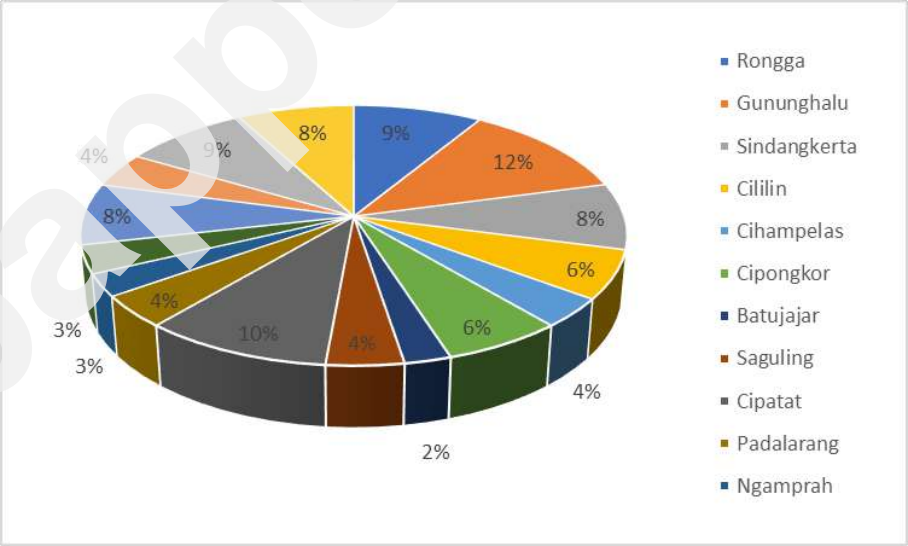
Mengenai luas wilayah Kabupaten Bandung Barat per-Kecamatan dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini:

Tabel IV.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa
1	Rongga	11.263,55	8
2	Gununghalu	15.547,28	9
3	Sindangkerta	10.630,43	11
4	Cililin	7.783,35	11
5	Cihampelas	4.704,15	10
6	Cipongkor	8.015,59	14
7	Batujajar	3.111,31	7
8	Saguling	5.157,98	6
9	Cipatat	12.598,26	12
10	Padalarang	5.163,25	10
11	Ngamprah	3.565,31	11
12	Parongpong	4.502,04	7
13	Lembang	9.822,25	16
14	Cisarua	5.562,81	8
15	Cikalong Wetan	11.094,06	13
16	Cipendeuy	10.218,87	12
JUMLAH		**128.740,50**	**165**

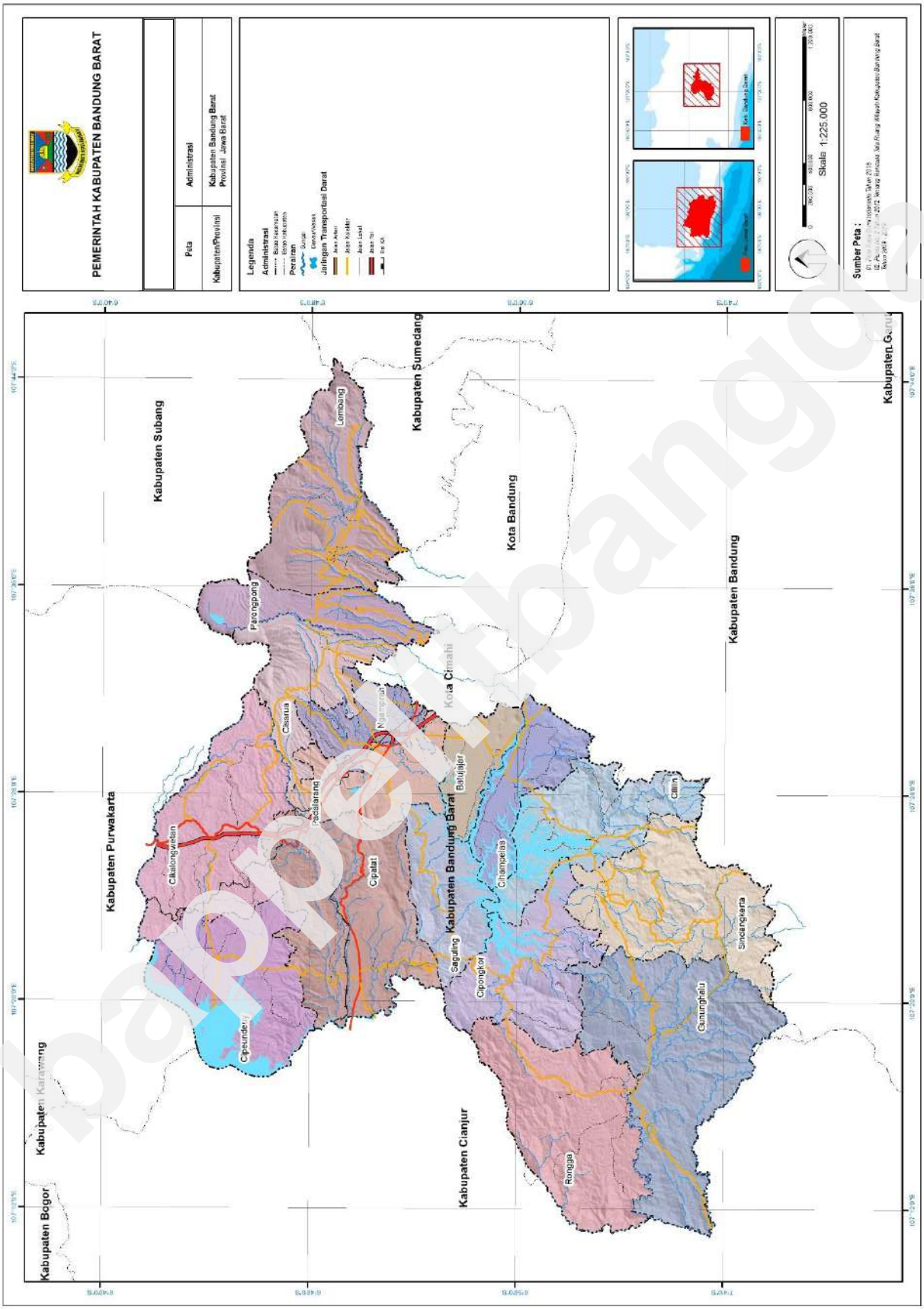
Sumber: RTRW Kab. Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2021

Gambar 4.1 Distribusi Persentase Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2020

Gambar 4.2 Peta Administrasi Kabupaten Bandung Barat



4.2 Kondisi Fisik

A. Topografi

1. Kemiringan Lereng

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%) dengan Kecamatan Gununghalu sebagai kecamatan terluas. Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas. Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja.

Tabel IV.2 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bandung Barat

No.	Kecamatan	0-8%	8-15%	15-25%	25-40%	>40%
1	Lembang	1.530	-	5.201	-	2.970
2	Parongpong	2.290	-	950	-	1.225
3	Cisarua	530	-	2.292	1.500	1.214
4	Cikalongwetan	550	-	3.400	3.200	4.058
5	Cipeundeuy	2.450	-	3.200	-	4.475
6	Ngamprah	1.160	-	379	1.650	420
7	Cipatat	2.950	710	1.950	-	6.940
8	Padalarang	4.096	202	860	-	-
9	Batujajar	4.899	-	580	-	2.889
10	Cihampelas	2.150		-	490	2.701
11	Cililin	1.640	1.140	-	710	3.986
12	Cipongkor	2.210	200	2.050	1.090	2.075
13	Rongga	1.700	-	292	507	8.812
14	Sindangkerta	1.064	600	4.350	425	5.596
15	Gununghalu	320	-	400	1.880	13.480
Total		**29.539**	**2.852**	**25.904**	**11.452**	**60.841**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2021

2. Ketinggian

Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 0 – 2500 mdpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat berada pada ketinggian 500-1000 mdpl dengan luas wilayah sebesar 68.788,08 Ha, kemudian seluas 32.484,36 Ha berada pada ketinggian 1000-1500 mdpl, seluas 20.322,63 Ha berada pada ketinggian <500 mdpl. Seluas 6.731,89 Ha berada pada ketinggian 1000-1500 mdpl, dan seluas 141,08 Ha berada pada ketinggian lebih dari 2000 mdpl.

Tabel IV.3 Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat

No	Ketinggian	Luas (Ha)
1	< 500 m	20.322,63
2	500 m - 1000 m	68.788,08
3	1000 m - 1500 m	32.484,36
4	1500 m - 2000 m	6.731,89
5	> 2000 m	141,08
JUMLAH		**128.468,04**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2021

B. Morfologi

Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 5 satuan morfologi yaitu dataran, dataran medan bergelombang, perbukitan landai, perbukitan sedang, dan perbukitan terjal. Yang menjadi dominasi di Kabupaten Bandung Barat yaitu perbukitan sedang dengan luas wilayah sebesar 74.720,53 Ha.

Tabel IV.4 Kondisi Morfologi di Kabupaten Bandung Barat

No	Morfologi	Luas (Ha)
1	Dataran	3.737,99
2	Dataran Medan Bergelombang	0,44
3	Perbukitan Landai	30.208,91
4	Perbukitan Sedang	74.720,53
5	Perbukitan Terjal	19.800,18
JUMLAH		**128.468,04**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2021

C. Hidrologi

1. Cekungan Air Tanah (CAT)

Kondisi cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh 5 CAT yang terdiri dari CAT Cibuni, CAT Lembang, CAT Batujajar, CAT Ciater, dan CAT Bandung-Soreang dengan luas keseluruhan mencapai 40.993,65 Ha. Untuk luas CAT tertinggi yaitu CAT Lembang dengan luas sebesar 18.663,66 Ha.

bappelitbangda

Tabel IV.5 Kondisi CAT di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama CAT	Luas (Ha)
1	CAT Cibuni	10,79
2	CAT Lembang	18.663,66
3	CAT Batujajar	7.012,99
4	CAT Ciater	7.404,66
5	CAT Bandung-Soreang	7.901,55
JUMLAH		40.993,65

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2021

2. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bandung Barat terdapat 4 DAS yaitu DAS Citarum, DAS Cibuni, DAS Cipunagara, dan DAS Ciasem. Hampir sebagian besar DAS di wilayah Kabupaten Bandung Barat berada di DAS Citarum yang memiliki luas sebesar 128.305,28 Ha.

Tabel IV.6 Kondisi DAS di Kabupaten Bandung Barat

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Citarum	128.305,28
2	Cibuni	15,34
3	Cipunagara	106,82
4	Ciasem	40,35
JUMLAH		**128.467,79**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2020

D. Klimatologi

Kondisi curah hujan di Kabupaten Bandung Barat berkisar antara <1500 mm/tahun hingga 3500 mm/tahun. Namun sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat mempunyai curah hujan berkisar 2500-3000 mm/tahun.

Tabel IV.7 Kondisi DAS di Kabupaten Bandung Barat

No	CH (mm/tahun)	Luas (Ha)
1	< 1500 mm/th	5.480,72
2	1500-2000 mm/th	19.489,39
3	2000-2500 mm/th	39.647,30
4	2500-3000 mm/th	48.993,38
5	3000-3500 mm/th	14.857,25
JUMLAH		**128.468,04**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2020

E. Penggunaan Lahan

bappelitbangda

Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 20 jenis. Untuk penggunaan lahan yang dominan yaitu jenis penggunaan lahan ladang dengan luas wilayah mencapai 26.357,64 Ha sedangkan jenis penggunaan lahan dengan luas terendah yaitu jenis penggunaan lahan perdagangan dan jasa yang hanya mencapai 4,61 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

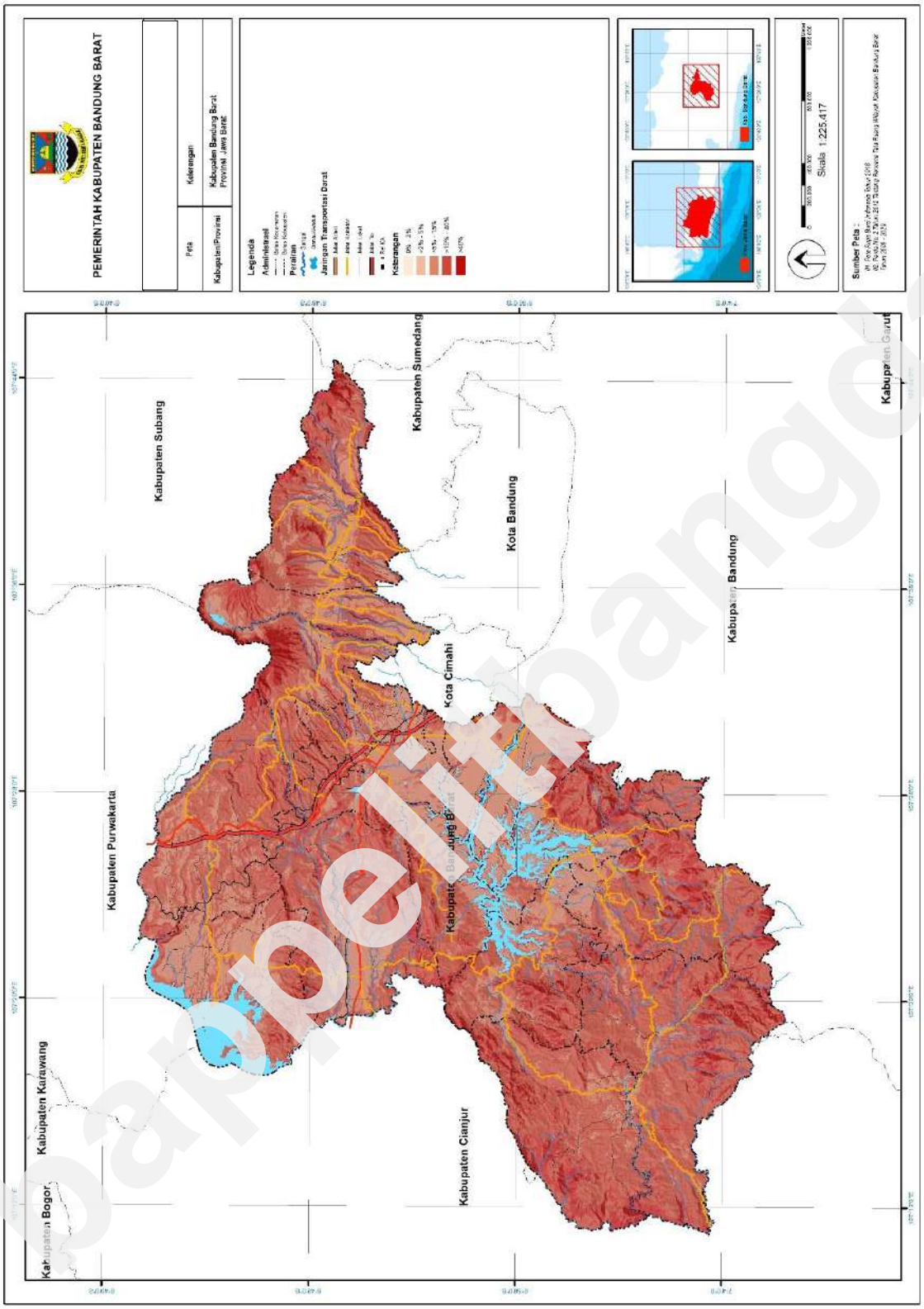
Tabel IV.8 Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Bandara	4,80
2	Hutan	2.422,88
3	Hutan Rimba	14.011,12
4	Industri	83,42
5	Ladang	26.357,64
6	Perdagangan & Jasa	4,61
7	Perkebunan	25.111,70
8	Permukiman	20.537,56
9	Pertambangan	107,58
10	Rawa	8,20
11	Rumput	12,07
12	Sawah	21.166,21
13	Sawah Tadah Hujan	50,64
14	Semak Belukar	10.999,14
15	Stadion	12,87
16	Taman	4,63
17	Tambang	311,60
18	Tanah Kosong	664,36
19	Vegetasi Non Budidaya	51,01
20	Waduk	6.599,12
JUMLAH		**128.521,17**

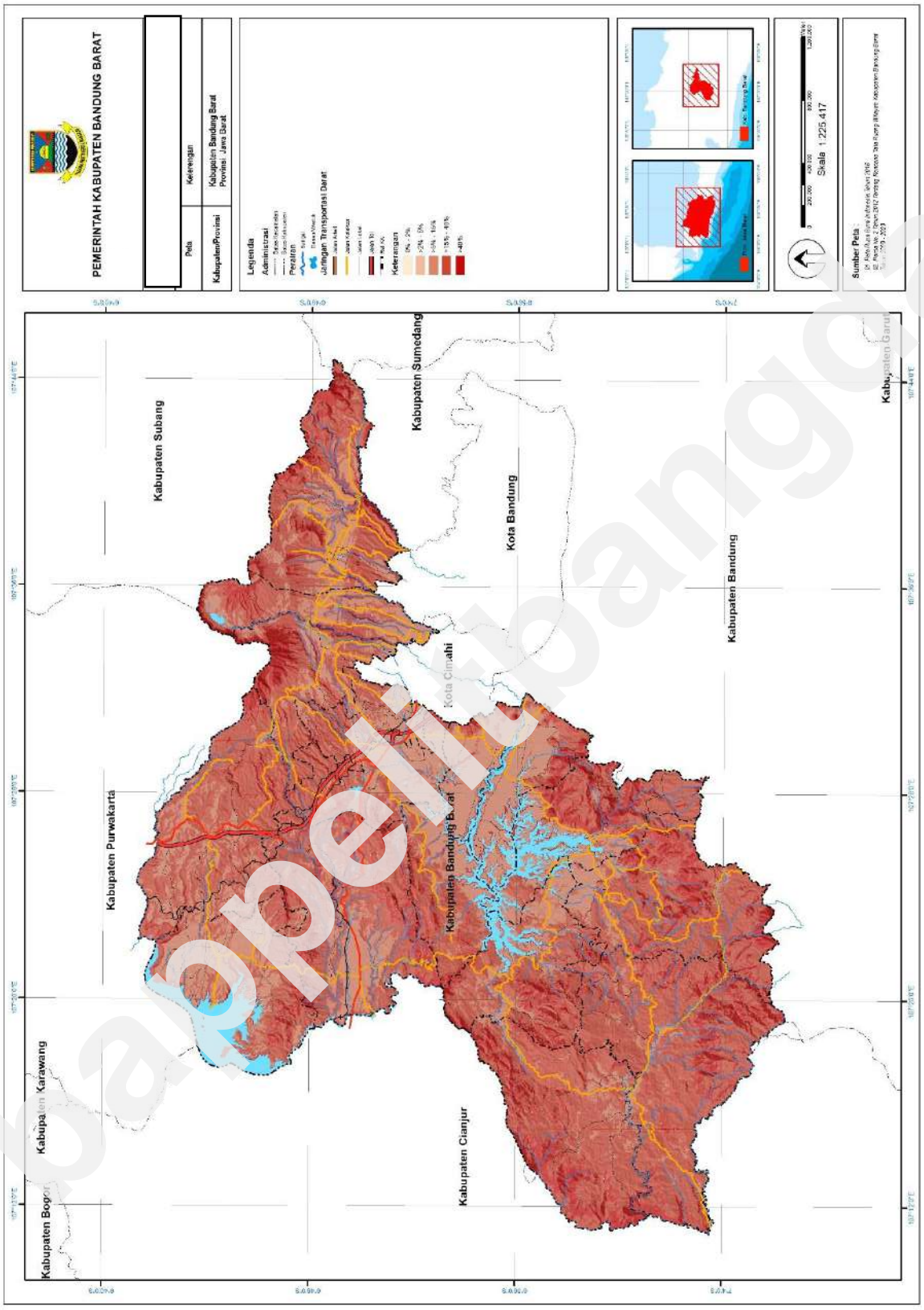
Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat dan Hasil Pengolahan GIS Tahun 2020

bappelitbangda

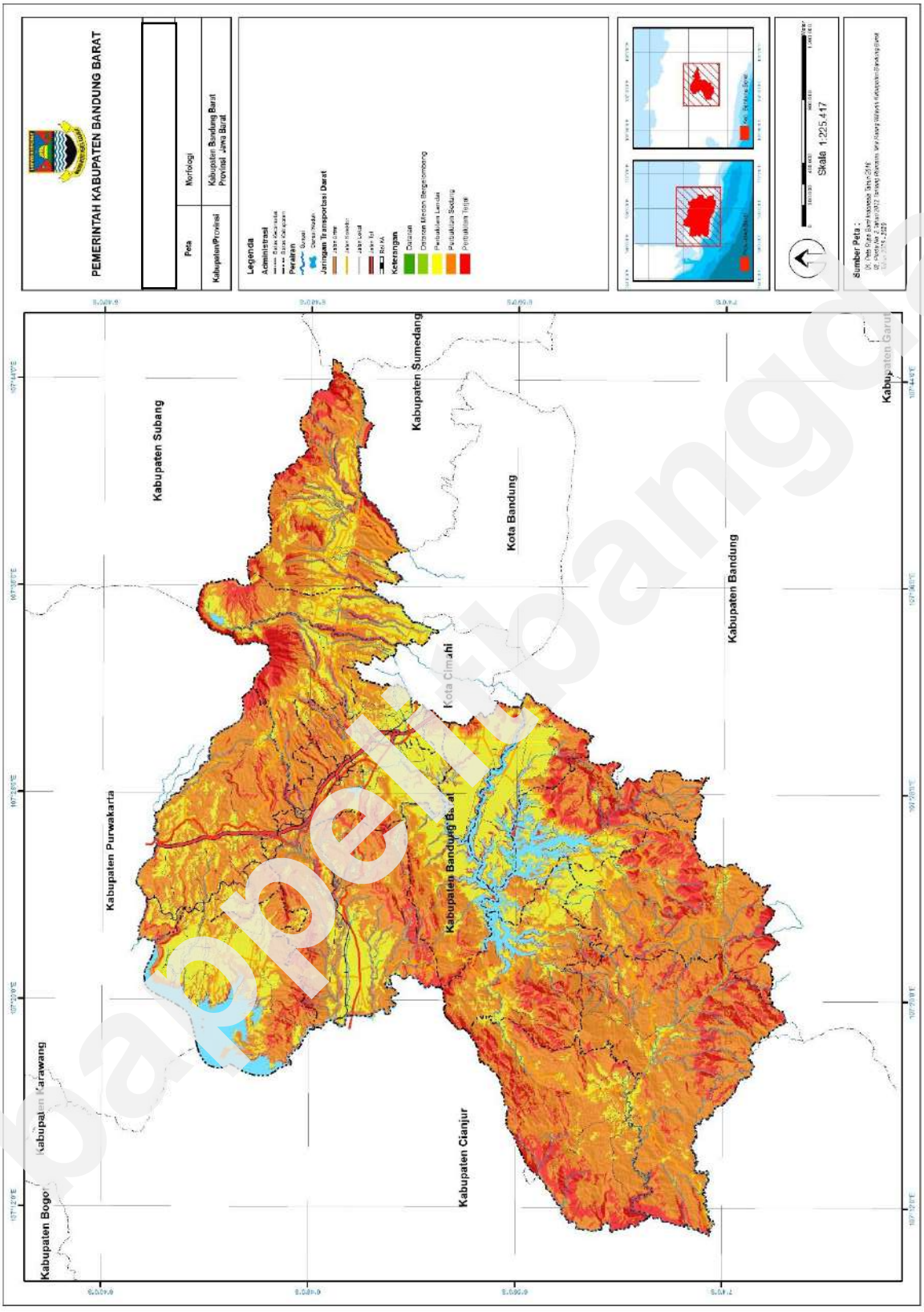
Gambar 4.3 Peta Kemiringan Lereng di Kabupaten Bandung Barat



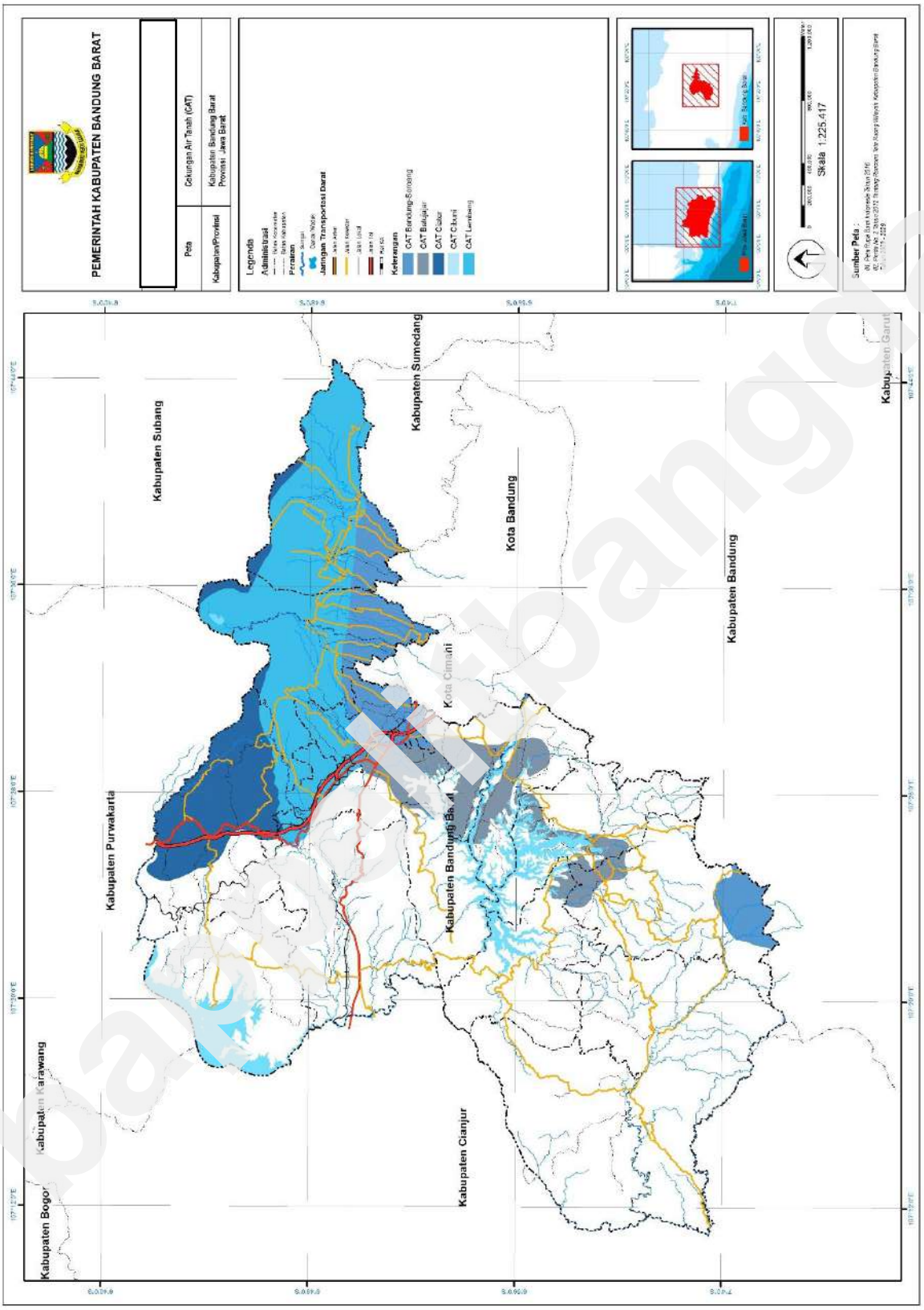
Gambar 4.4 Peta Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat



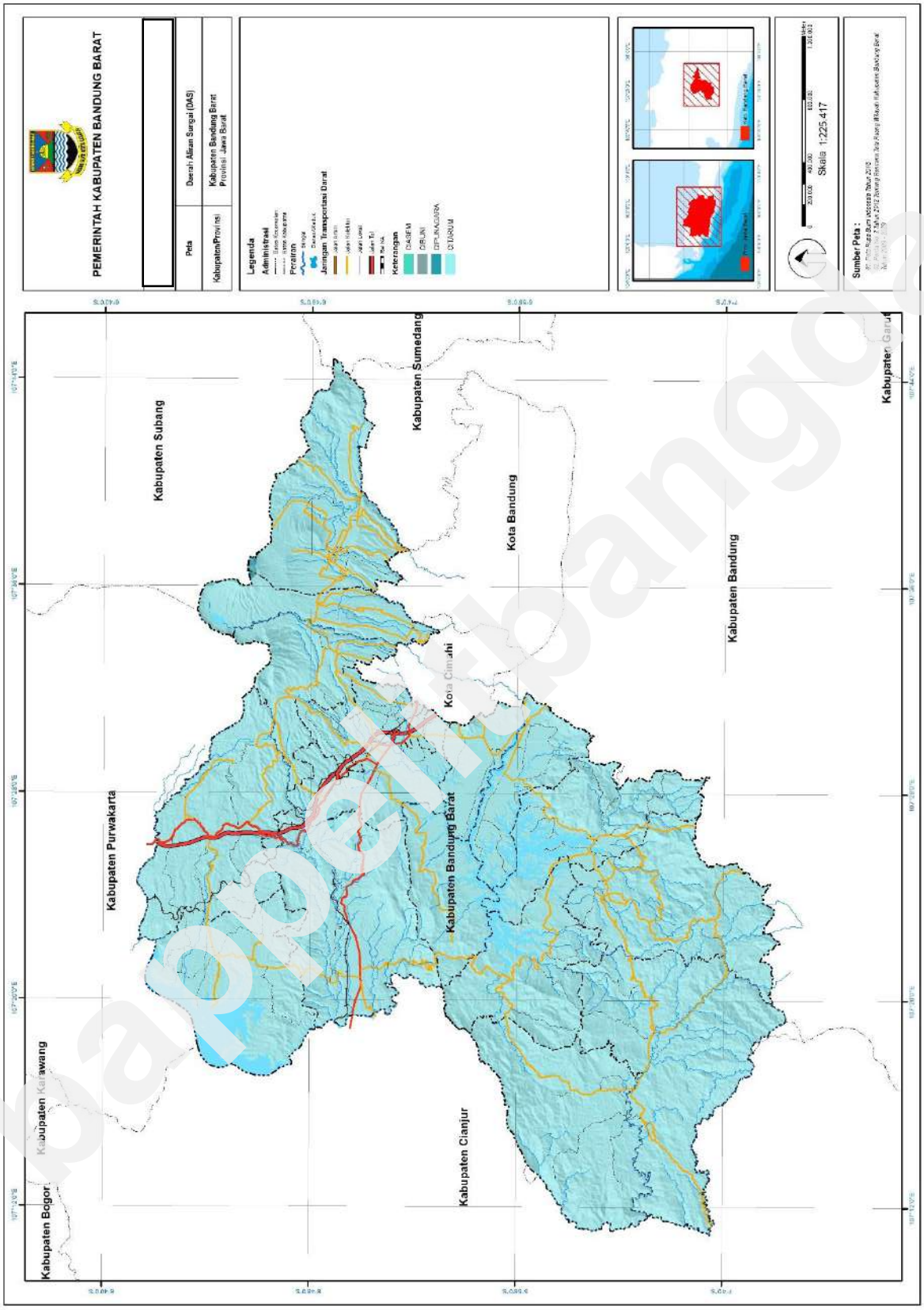
Gambar 4.5 Peta Morfologi di Kabupaten Bandung Barat



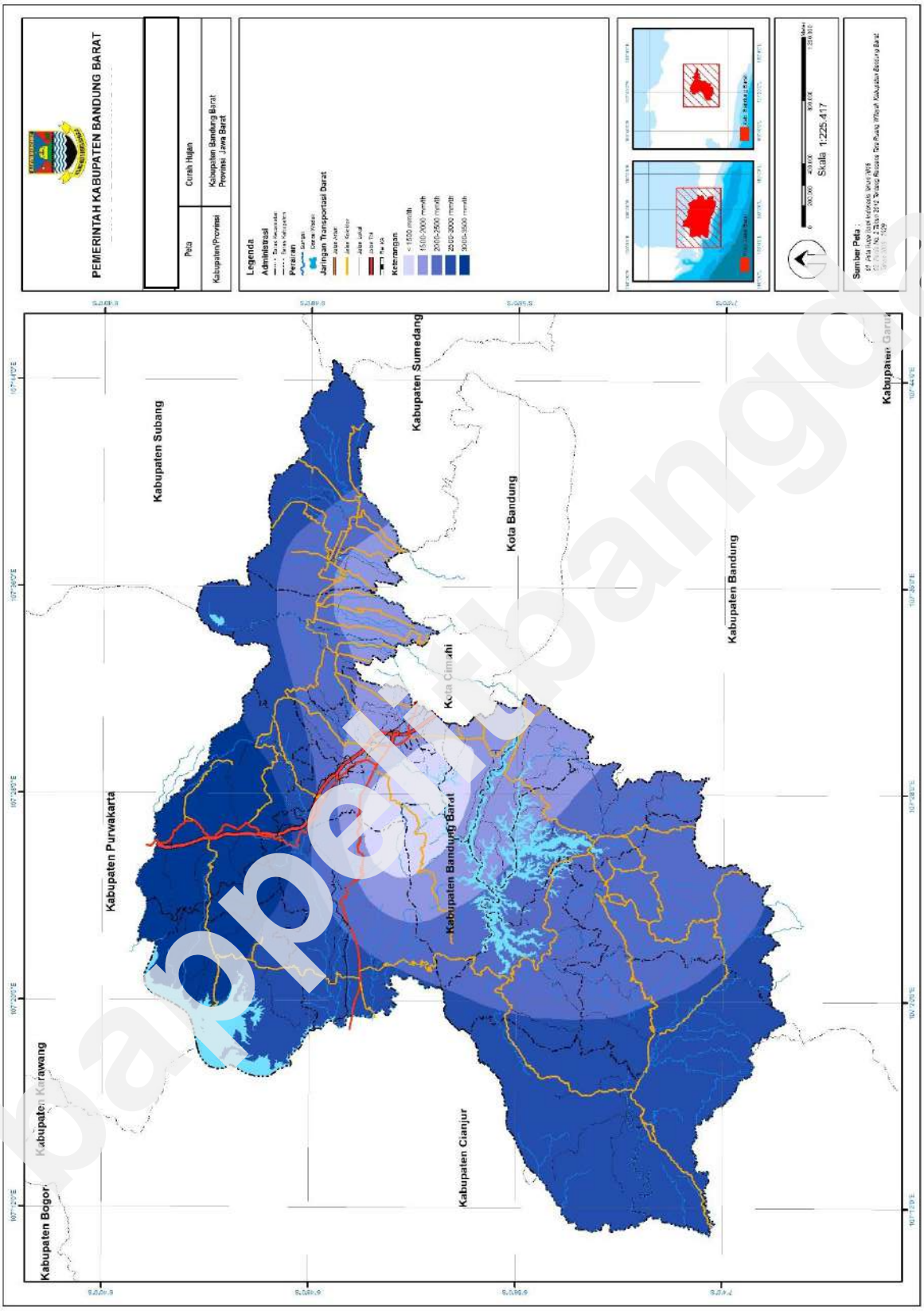
Gambar 4.6 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di Kabupaten Bandung Barat



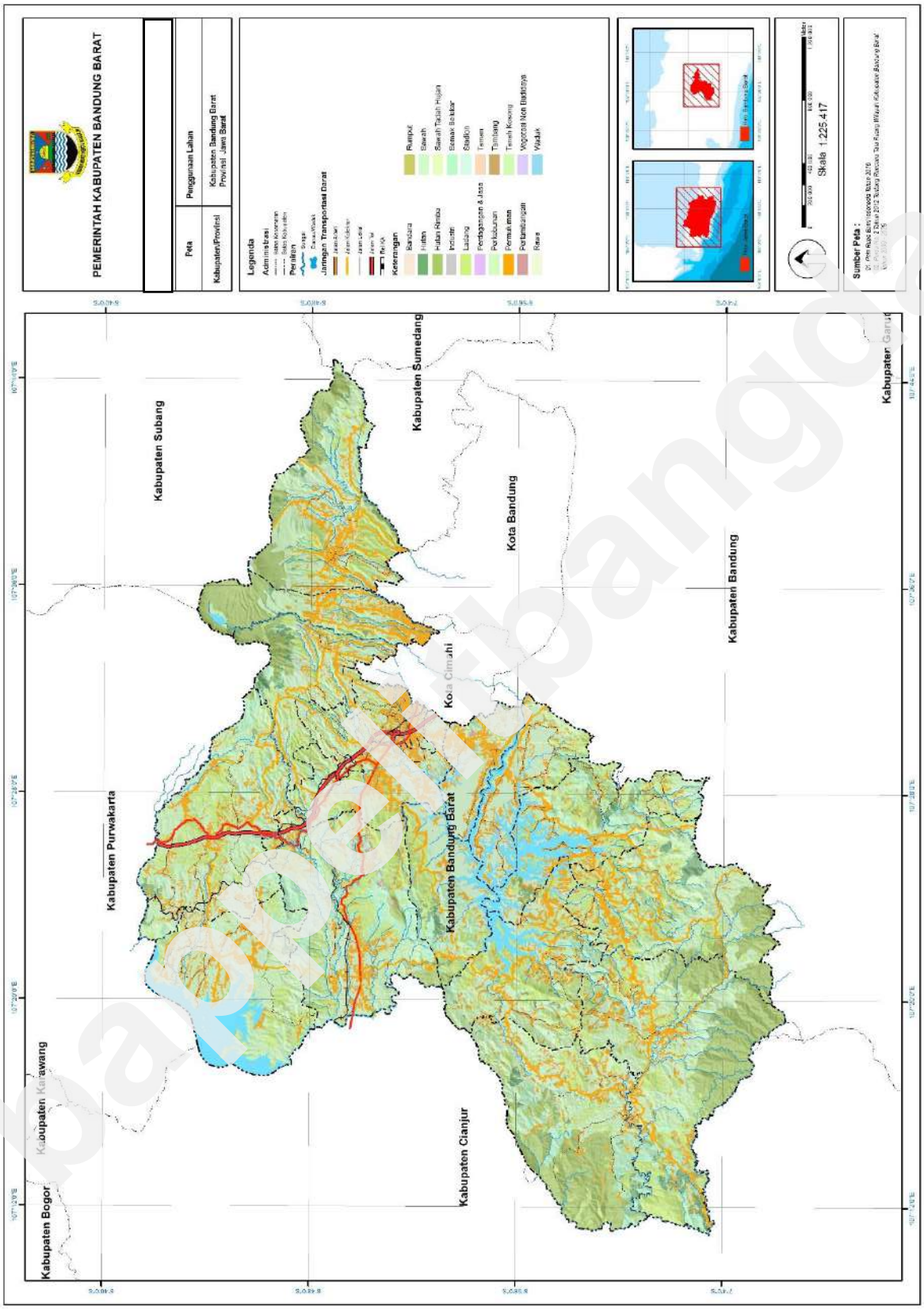
Gambar 4.7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Bandung Barat



Gambar 4.8 Peta Curah Hujan di Kabupaten Bandung Barat



Gambar 4.9 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat



4.3 Kondisi Sosial Kependudukan

A. Persebaran Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan salah satu aset di suatu wilayah yang harus terus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat mencapai 1.788.336 jiwa yang terdiri dari 875.251 jiwa berjenis kelamin perempuan dan sebanyak 913.085 jiwa berjenis kelamin laki-laki.

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tersebar pada 16 kecamatan, secara lebih rinci jumlah penduduk setiap kecamatannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.9 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

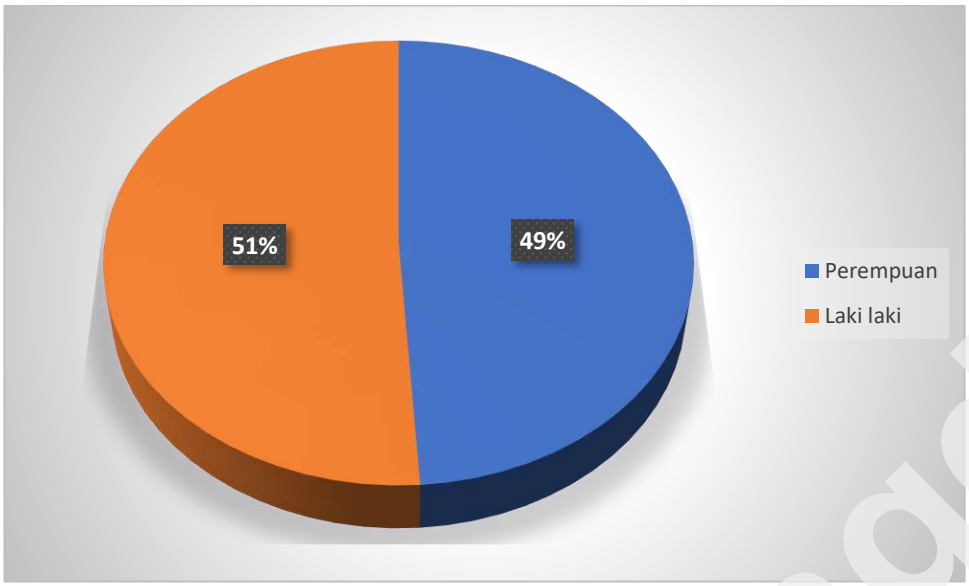
No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Perempuan	Laki laki	
1	Rongga	29.420	31.246	60.666
2	Gununghalu	38.470	40.705	79.175
3	Sindangkerta	36.172	37.286	73.458
4	Cililin	46.439	49.031	95.470
5	Cihampelas	64.568	68.091	132.659
6	Cipongkor	48.776	51.215	99.991
7	Batujajar	53.056	54.779	107.835
8	Saguling	16.562	17.258	33.820
9	Cipatat	68.687	71.614	140.301
10	Padalarang	88.929	92.430	181.359
11	Ngamprah	87.320	90.370	177.690
12	Parongpong	55.556	57.449	113.005
13	Lembang	96.741	100.899	197.640
14	Cisarua	38.823	40.331	79.154
15	Cikalongwetan	62.676	65.430	128.106
16	Cipeundeuy	43.056	44.951	88.007
Kab. Bandung Barat		**875.251**	**913.085**	**1.788.336**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa proporsi penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 51 % sedangkan perempuan sebesar 49 %.

bappelitbangda

Gambar 4.10 Grafik Perbandingan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2021

B. Distribusi dan Kepadatan Penduduk

Dengan luas wilayah sekitar 128.740,49 Ha, maka kepadatan penduduk rata-rata tahun 2020 di Kabupaten Bandung Barat mencapai 18 jiwa/ha. Dalam hal kepadatan penduduk, Kecamatan Ngamprah memiliki kepadatan yang paling tinggi yaitu sebanyak 50 jiwa/ha, sedangkan Kecamatan Rongga dan Kecamatan Gununghalu merupakan kepadatan yang terendah yaitu sebesar 5 jiwa/ha. Secara lebih rinci, kepadatan penduduk setiap kecamatan di Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut;

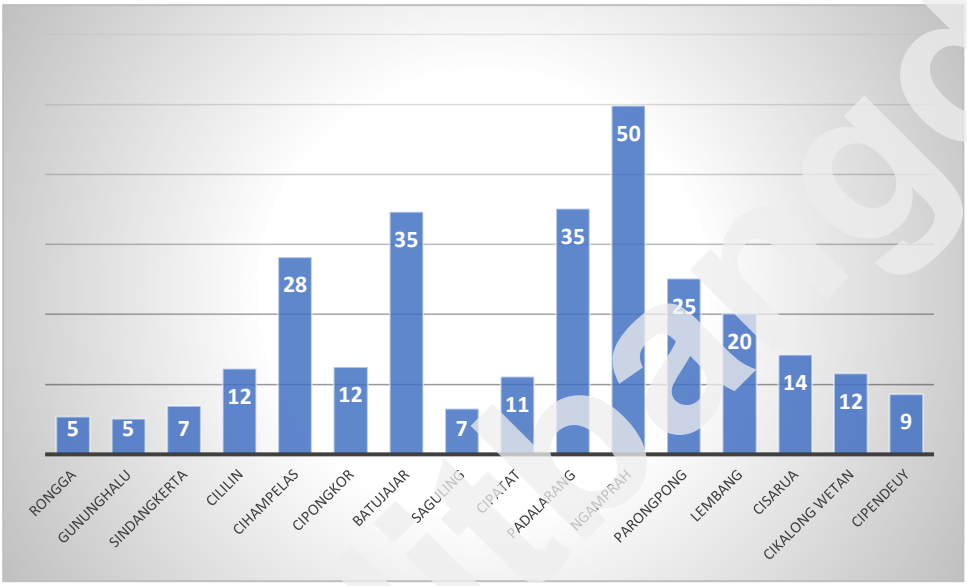
Tabel IV.10 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Rongga	11.263,55	60.666	5
2	Gununghalu	15.547,28	79.175	5
3	Sindangkerta	10.630,43	73.458	7
4	Cililin	7.783,35	95.470	12
5	Cihampelas	4.704,15	132.659	28
6	Cipongkor	8.015,59	99.991	12
7	Batujajar	3.111,31	107.835	35
8	Saguling	5.157,98	33.820	7
9	Cipatat	12.598,26	140.301	11
10	Padalarang	5.163,25	181.359	35
11	Ngamprah	3.565,31	177.690	50
12	Parongpong	4.502,04	113.005	25
13	Lembang	9.822,25	197.640	20
14	Cisarua	5.562,81	79.154	14

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
15	Cikalong Wetan	11.094,06	128.106	12
16	Cipendeuy	10.218,87	88.007	9
Kab. Bandung Barat		128.740,49	1.788.336,00	18

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Gambar 4.11 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020



Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

C. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bandung Barat rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 IPM sebesar 65,81 kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 66,63 kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 67,46 kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 68,27 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,08. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.11 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2020

Tahun	Kesehatan	Pendidikan		Daya beli	I P M
	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	Indeks
2016	71,82	11,56	7,63	7.698	65,81
2017	71,87	11,79	7,74	8.002	66,63

Tahun	Kesehatan	Pendidikan		Daya beli	I P M
	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	Indeks
2018	72,03	11,83	7,97	8.329	67,46
2019	72,18	11,86	8,18	8.684	68,27
2020	72,34	11,87	8,19	8.455	68,08

Sumber: Analisis Capaian Indikator Pembangunan, KBB Tahun 2021

Berdasarkan data pada tahun 2020, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 73,34 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73,34 tahun. Dari sisi pendidikan, penduduk Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 8,19 tahun masa sekolah atau berada di kelas VIII. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 11,87 tahun atau setara dengan Kelas XI atau sampai SMA kelas 2. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp 8,19 juta per kapita per tahun.

Dimensi pendidikan untuk harapan lama sekolah bergerak dari 11,56 menjadi 11,87 tahun, sementara rata lama sekolah dari 7,63 menjadi 8.19 selama tahun 2016 sampai 2020. Standar hidup layak juga meningkat dari Rp.7.698.000 pada tahun 2016 menjadi Rp. 8.455.000 pada tahun 2020

Tabel IV.12 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Menurut Kecamatan (Angka Regional)

Kecamatan	Kesehatan	Pendidikan		Daya beli	I P M	
	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	Indeks	Rank
Cililin	73,80	12,09	8,86	8.570,00	69,92	7
Cihampelas	73,53	12,13	8,96	8.617,00	70,02	6
Sindangkerta	72,47	12,03	7,98	8.498,00	68,10	9
Gunung Halu	71,03	11,89	7,81	8.463,00	67,06	13
Rongga	69,10	11,58	6,83	8.489,00	64,65	16
Cipongkor	67,25	12,09	6,99	8.622,00	64,73	14
Batujajar	73,26	12,03	9,10	8.704,00	70,07	5
Saguling	68,36	11,86	6,76	8.585,00	64,65	15
Lembang	74,83	12,13	8,91	8.869,00	70,84	1
Parongpong	75,48	12,02	8,57	8.674,00	70,34	2
Cisarua	73,27	11,77	8,52	8.618,00	69,00	8
Ngamprah	71,59	12,09	9,69	8.813,00	70,24	4
Padalarang	73,14	12,15	9,03	8.855,00	70,25	3
Cipatat	72,41	11,85	7,70	8.754,00	67,83	11
Cipeundeuy	72,29	11,93	7,99	8.532,00	67,97	10
Cikalong Wetan	72,97	11,90	7,31	8.617,00	67,45	12

Sumber: Makro Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

4.4 Ekonomi

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang banyak diaplikasikan oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Oleh karena kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian eksploitasi terhadap sumber daya alam sangat mencolok tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di Kabupaten Bandung Barat semakin membaik dibandingkan dengan tahun 2018. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat terhadap tahun 2018 adalah sekitar 5,64 persen. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai 47.180.080,51 juta rupiah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. PDRB atas harga konstan menurut Lapangan Usaha pada tahun 2019 mencapai 31.398.351,99 juta rupiah, cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018 sebesar 29.888.888,08 juta rupiah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berikut adalah penjabarannya:

bappelitbangda

Tabel IV.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (Juta Rupiah) Tahun 2015 - 2020

Lapangan Usaha		Tahun (Juta Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian	4.642.949,51	5.187.603,97	5.442.755,92	5.895.308,97	6.325.510,89	6.173.590,02
B	Pertambangan dan Penggalian	438.580,78	450.515,23	459.938,67	473.242,76	476.904,82	476.313,26
C	Industri Pengolahan	13.379.940,68	14.563.502,72	15.954.910,57	17.505.323,86	18853 417,37	18738190,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	223.918,60	271.412,74	318.860,35	354.046,71	390.491,90	375.826,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.096,92	13.868,86	14.985,83	16.788,97	17.775,37	19.681,71
F	Konstruksi	2.674.441,71	2.847.880,48	3.044.752,27	3.305.391,77	3.613.703,00	3.421.281,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.855.886,46	5.220.815,04	5.620.676,53	6.010.720,69	6.404.983,94	5.997.680,06
H	Transportasi dan Pergudangan	1.832.452,22	1.994.266,79	2.161.829,63	2.325.189,56	2.503.973,08	2.436.302,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.590.892,15	1.769.270,64	1.980.166,29	2.217.519,87	2.436.393,12	2.401.855,97
J	Informasi dan Komunikasi	577.696,66	641.277,45	712.192,42	746.824,26	786.488,19	999.357,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	282.607,82	312.741,37	346.872,72	381.600,92	414.199,51	418.930,05
L	Real Estate	586.473,82	632.120,61	691.450,10	773.519,11	853.130,50	855.106,02
M,N	Jasa Perusahaan	144.698,75	158.581,55	174.936,05	194.909,02	212.594,84	192.793,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.085.937,33	1.143.752,16	1.203.951,15	1.279.812,36	1.365.490,18	1.269.760,06
P	Jasa Pendidikan	1.160.878,93	1.269.217,55	1.435.511,12	1.616.543,36	1.742.813,80	1.942.600,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161.457,01	183.034,37	210.307,29	234.661,14	259.849,14	258.021,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	340.712,31	383.398,39	430.300,03	476.304,07	522.360,85	501.600,40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**33.991.621,68**	**37.043.259,92**	**40.204.396,93**	**43.807.707,41**	**47.180.080,51**	**46.478.896,61**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		**33.991.621,68**	**37.043.259,92**	**40.204.396,93**	**43.807.707,41**	**47.180.080,51**	**46.478.896,61**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2021

Tabel IV.14 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (Juta Rupiah) Tahun 2015 - 2020

Lapangan Usaha		Tahun (Juta Rupiah)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian	3.352.645,47	3.543.508,57	3.592.889,70	3.688.414,57	3.790.596,90	3.711.111,98
B	Pertambangan dan Penggalian	315.157,49	320.578,19	326.159,58	333.997,35	329.673,45	322.491,18
C	Industri Pengolahan	10.148.107,37	10.681.832,76	11.321.756,64	12.071.601,93	12.770.356,17	12.517.132,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	202.787,45	215.994,00	221.966,44	229.847,96	237.126,20	229.816,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9.539,30	10.066,83	10.651,45	11.172,88	11.501,36	12.675,89
F	Konstruksi	1.881.117,42	1.963.510,36	2.056.950,11	2.187.510,91	2.349.047,24	2.214.819,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.676.101,85	3.885.035,94	4.070.729,42	4.220.207,32	4.382.109,61	4.024.970,54
H	Transportasi dan Pergudangan	1.293.586,55	1.392.054,01	1.464.494,45	1.537.221,30	1.605.322,60	1.544.007,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.240.160,23	1.330.759,72	1.437.157,72	1.547.794,52	1.645.766,21	1.568.894,60
J	Informasi dan Komunikasi	549.155,71	609.398,09	676.384,32	737.769,98	799.673,19	1.015.818,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	210.849,00	228.163,10	239.191,86	250.864,98	259.485,70	263.149,74
L	Real Estate	453.883,01	483.839,29	515.936,54	566.484,62	615.109,15	616.026,90
M,N	Jasa Perusahaan	113.082,39	122.253,37	132.327,93	143.300,66	154.157,04	135.496,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	739.685,92	747.970,40	755.055,26	765.215,57	740.303,92	706.197,06
P	Jasa Pendidikan	914.268,76	972.752,47	1.055.166,27	1.112.360,86	1.189.952,33	1.241.418,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	124.120,65	135.936,93	148.999,28	160.823,96	172.962,34	172.470,31
R,S,T,U	Jasa lainnya	261.922,19	282.222,17	304.207,85	324.298,71	345.208,59	343.910,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**25.486.170,75**	**26.925.876,22**	**28.330.024,82**	**29.888.888,08**	**31.398.351,99**	**30.640.409,47**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		**25.486.170,75**	**26.925.876,22**	**28.330.024,82**	**29.888.888,08**	**31.398.351,99**	**30.640.409,47**

Sumber: Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2021

bappelitbangda

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

PENYUSUNAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KABUPATEN BANDUNG BARAT



bappelitbangda

BAB V

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN IPG DAN IDG



BAB V

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN IPG DAN IDG

5.1 Penentuan Sampel

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sedangkan teknik pengambilan merupakan cara atau metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut.

Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaaan populasi yang sebenarnya. (Sugiyono, 2016, h. 80)

Pengambilan sampel pada kegiatan ini bertujuan untuk membantu konsultan dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dapat peneliti jumpai di lapangan seperti populasi yang terlalu banyak serta terkendala dalam hal tenaga, waktu, dan biaya.

Metode pengambilan sampel digunakan dengan menggunakan rumus Slovin dengan *Margin of error* sebesar 10 % (0,1), selain itu mempertimbangkan populasi Kabupaten Bandung Barat yang berjumlah 1.788.336 jiwa. Berikut ini rumus slovin yang digunakan :

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

Dari rumus tersebut maka dapat diketahui sebagai berikut :

N = 1.788.336/ [1+(1.788.336 x $0{,}1^2$)]

= 1.788.336/ [1+(1.788.336 x 0,01)]

= 1.788.336/ 17.883,36

= 100 Responden

Selanjutnya, dari jumlah total tersebut dibagi sesuai populasi penduduk di masing – masing kecamatan :

Tabel V.1 Pembagian Jumlah Sampel Dirinci Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Distribusi Persentasi (%)	Jumlah Responden
1	Rongga	60.666	3	3
2	Gununghalu	79.175	4	4
3	Sindangkerta	73.458	4	4
4	Cililin	95.470	5	5
5	Cihampelas	132.659	7	7
6	Cipongkor	99.991	6	6
7	Batujajar	107.835	6	6
8	Saguling	33.820	2	2
9	Cipatat	140.301	8	8
10	Padalarang	181.359	10	10
11	Ngamprah	177.690	10	10
12	Parongpong	113.005	6	6
13	Lembang	197.640	11	11
14	Cisarua	79.154	4	4
15	Cikalong Wetan	128.106	7	7
16	Cipeundeuy	88.007	5	5
Kab. Bandung Barat		**1.788.336,00**	**100**	**100**

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Berikut ini beberapa dokumentasi pada saat pelaksanaan kuesioner :

Gambar 5.1 Visualisasi Pelaksanaan Kuesioner







Sumber : Hasil Survey Lapangan Tahun 2021

5.2 Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010.

Tabel V.2 Metodologi Perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dimensi	Indikator	
Umur panjang dan sehat	Angka Harapan Hidup pada saat lahir (e0), Laki-laki & Perempuan	IPG/GDI
Pengetahuan	1. Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki & Perempuan	
	2. Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki & Perempuan	
Kehidupan yang layak	Perkiraan pendapatan; Laki-laki & Perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan sebagai berikut :

bappelitbangda

Tabel V.3 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

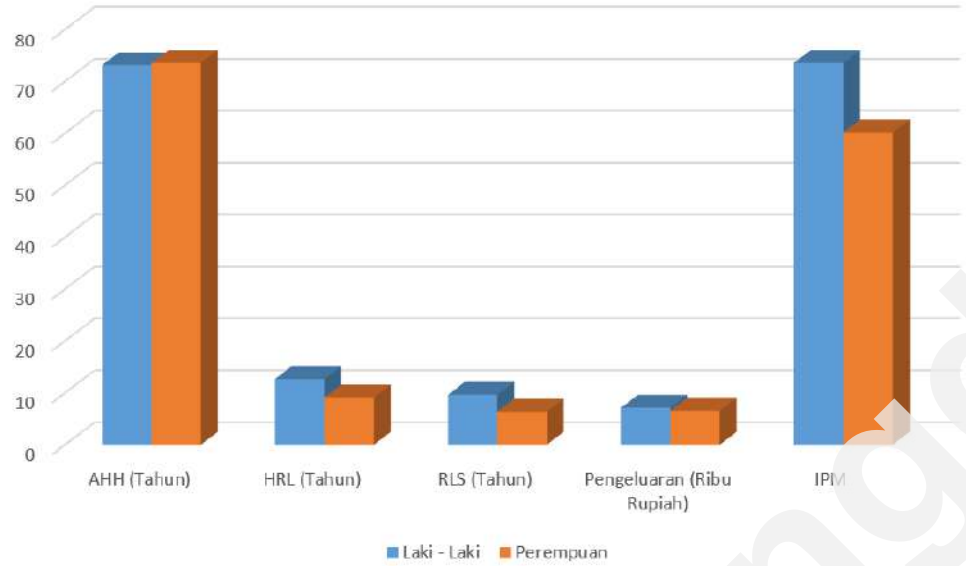
Indikator	Parameter	Laki - Laki	Perempuan
Kesehatan	AHH (Tahun)	73,14	73,56
Pendidikan	HRL (Tahun)	12,67	9,11
	RLS (Tahun)	9,65	6,37
Ekonomi	Pengeluaran (Ribu Rupiah)	7,12	6,56
IPM		73,56	60,14
IPG		**81,76**	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis di atas, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Bandung Barat sudah mencapai 73,14 tahun untuk laki – laki dan 73,56 tahun untuk perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa hidup bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 73-an tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Dari sisi pendidikan, penduduk Kabupaten Bandung Barat yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh 9,65 tahun masa sekolah atau berada di kelas IX untuk laki-laki dan 6,37 tahun masa sekolah atau berada di kelas VI untuk perempuan. Selain itu, rata-rata anak usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diperkirakan dapat mengenyam pendidikan hingga 12,67 tahun atau setara dengan Kelas XII atau sampai SMA kelas 3 untuk laki-laki dan 9,11 tahun atau setara dengan kelas IX atau sampai SMP kelas 3 untuk perempuan. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp 7,12 juta per kapita per tahun untuk laki-laki dan 6,56 juta per kapita per tahun untuk perempuan. Sehingga untuk IPM laki – laki sebesar 73,56 dan IPM perempuan sebesar 60,14, sehingga nilai IPG yang didapat sebesar 81,76.

bappeda

Gambar 5.2 Perbandingan Komponen IPG Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

5.3 Analisis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selain itu IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.

Tabel V.4 Metodologi Perhitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dimensi	Indikator	
Keterwakilan di Parlemen	Proporsi keterwakilan di Parlemen Laki-laki & Perempuan	IDG/GEM
Pengambilan keputusan	Proporsi pengambilan keputusan, Laki-Laki & Perempuan	
Distribusi Pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian; Laki-2 & Perempuan	

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa :

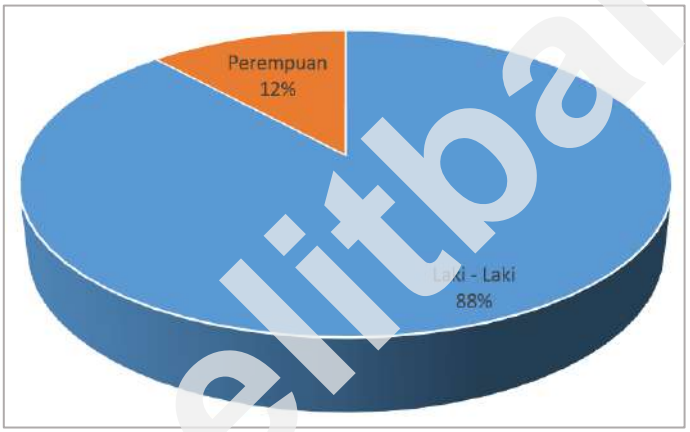
Tabel V.5 Data Keterwakilan Parlemen di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Dapil	Laki - Laki	Perempuan	Total
Dapil 1	9	2	11
Dapil 2	9	1	10
Dapil 3	9	2	11
Dapil 4	9	1	10
Dapil 5	9	0	9
Jumlah	45	6	51

Sumber : https://dprd.bandungbaratkab.go.id/

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterwakilan laki-laki jauh lebih besar yaitu sebesar 45 orang dibandingkan dengan perempuan yang hanya 6 orang.

Gambar 5.3 Grafik Keterwakilan Parlemen di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Gender Tahun 2021



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Sementara itu, terkait komponen pengambilan keputusan yang diambil sampel dilihat dari data PNS di Kabupaten Bandung Barat.

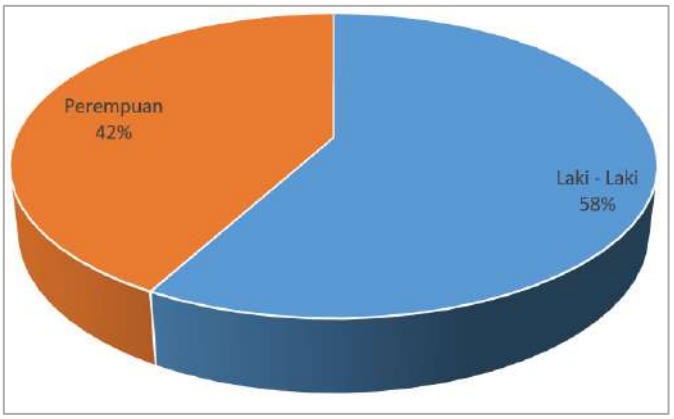
Tabel V.6 Jumlah PNS di Kabupaten Bandung Barat

Jumlah Pegawai (Orang)	7.379
Laki – Laki (Orang)	4.280
Perempuan (Orang)	3.099

Sumber : BKPSDM, Tahun 2021

bappelitbangda

Gambar 5.4 Grafik Perbandingan PNS di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Gender Tahun 2021



Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Dari hasil diatas maka dapat dirumuskan dalam perhitungan IDG sebagai berikut :

Tabel V.7 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

I (par)	56,73
I (dDM)	64,26
I (inc - des)	75,65
IDG	**65,55**

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

Dari hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Bandung Barat masih rendah yaitu baru mencapai 65,55, artinya perempuan di Kabupaten Bandung Barat belum optimal atau masih dominannya laki-laki dalam hal pembangunan dan perekonomian.

5.4 Perumusan Isu Strategis

Perumusan isu strategis perlu dilakukan karena sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi yang akan diterapkan. Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan di atas, kunjungan lapangan, dan FGD yang telah dilakukan maka didapatkan isu strategis sebagai berikut ini :

A. Pelaksanaan Pengarustamaan Gender

1. Belum optimalnya penguatan hukum dalam pelaksanaan Pengarus tamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bandung Barat
2. Belum optimalnya dukungan politik dalam pengarusutamaan gender

3. Kebijakan pembangunan yang responsive gender belum terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD)
4. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender
5. Belum optimalnya sistem dan informasi gender

B. Pembangunan Gender

1. Masih rendahnya AHH di Kabupaten Bandung Barat yaitu 72,34 (di bawah nilai Provinsi pada tahun 2020 sebesar 73,04)
2. Masih belum meratanya infrastruktur pendidikan
3. Masih rendahnya rata – rata lama sekolah
4. Masih rendahnya harapan lama sekolah
5. Rendahnya pendapatan pelaku usaha pertanian
6. Rendahnya pendapatan masyarakat pedesaan khususnya di Kabupaten Bandung Barat bagian selatan
7. Rendahnya kesenjangan gender di parlemen Kabupaten Bandung Barat
8. Belum meratanya pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan

bappelitbangda

5.5 Kebijakan, Strategi, dan Rekomendasi

Kebijakan, strategi, dan rekomendasi ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IPG dan IDG di Kabupaten Bandung Barat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.8 Kebijakan, Strategi, dan Rekomendasi dalam Upaya Peningkatan IPG dan IDG di Kabupaten Bandung Barat

No	Kebijakan	Strategi	Rekomendasi	Perangkat Daerah Pendukung
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)				
1	Penguatan dukungan politik dalam pelaksanaan PUG	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Optimalisasi Peraturan Daerah No 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan	DP2KBP3A
			Optimalisasi Perbup tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	DP2KBP3A
2	Peningkatan kebijakan pembangunan responsif gender	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pelatihan dan perencanaan dan penganggaran responsif gender	DP2KBP3A dan Bappelitbangda
			Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PUG skala kabupaten	DP2KBP3A
			Penyusunan pedoman dan mekanisme pelaporan PD tentang pelaksanaan PUG dalam pembangunan	DP2KBP3A
			Penyusunan indikator kinerja pencapaian PUG	DP2KBP3A
			Penyusunan pedoman dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender	DP2KBP3A
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa, kecamatan, dan PD	DP2KBP3A
			Pilot project anggaran responsif gender di beberapa PD	DP2KBP3A
		Perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Musrembang responsif gender	Bappelitbangda
3	Pengembangan kelembagaan pengarusutamaan gender	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Optimalisasi kinerja Pokja PUG, tim teknis PUG dan Focal Point PUG di masing-masing PD	Bappelitbangda
			Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja Focal Point dalam penyelenggaran PUG di PD	DP2KBP3A
			Pelaksanaan koordinasi Pokja PUG dan Tim Teknis PUG	Bappelitbangda

No	Kebijakan	Strategi	Rekomendasi	Perangkat Daerah Pendukung
			Penguatan jejaring kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat kecamatan dan desa	DP2KBP3A
			Pembentukan dan fasilitasi penyelenggaraan koordinasi forum PUG di Kab. Bandung Barat yang beranggotakan unsur masyarakat	DP2KBP3A
4	Peningkatan kapasitas SDM	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender	Pelatihan dan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi tim teknis Pokja PUG	DP2KBP3A
			Pelatihan dan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi focal point PD dan aparat pemerintah	Bappelitbangda
5	Pengembangan Sistem dan Informasi Gender	Pengembangan data/ informasi/ statistik daerah	Penyusunan pedoman pengumpulan data pilah gender di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten	DP2KBP3A
			Bimtek penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana PD	DP2KBP3A
			Penyusunan profil gender tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten	DP2KBP3A
Pembangunan Gender				
1	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan DaerahKabupaten/Kota	Dinkes
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat DaerahKabupaten/Kota	Dinkes
2	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan	Peningkatan RLS	Peningkatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Disdik
3	Peningkatan pelayanan informasi peluang kerja bagi pencari kerja	Peningkatan kesempatan kerja	Penyelenggaraan bursa kerja dengan memperhatikan gender	Disnaker
4	Pengembangan koperasi dan UMKM	Aksesibilitas pengembangan KUMKM	Pengembangan koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
		Pengembangan ekonomi kreatif	Penguatan ekonomi kreatif	Disparbud
			Festival ekonomi kreatif	Disparbud

No	Kebijakan	Strategi	Rekomendasi	Perangkat Daerah Pendukung
			Pembinaan ekonomi kreatif	Disparbud
			Pengembangan Bumdes	DPMPD
			Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi ibu rumah tangga	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
			Penyediaan informasi pasar produk UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
			Pemberdayaan Kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	DP2KBP3A
5	Peningkatan komitmen partai politik dalam pengalokasian calon legislatif perempuan	Pendidikan politik masyarakat	Pengembangan kerjasama dengan partai politik untuk mengalokasikan keterlibatan perempuan sebagai calon legislatif	DP2KBP3A
			Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan	DP2KBP3A
6	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan musrembang	Perencanaan pembangunan	Musrembang tingkat desa, kecamatan, kelurahan responsif gender	DP2KBP3A
7	Peningkatan penyediaan bantuan sosial	Pelayanan dan rehabilitasi sosial	Peningkatan kesejahteraan bagi PMKS	Dinsos
			Peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha bagi PMKS di lokasi P2WKSS	Dinsos dan DP2KBP3A
8	Pemerataan infrastruktur	Pemenuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan	Pembangunan sarana pendidikand an kesehatan tingkat desa, kecamatan, kabupaten	PUPR, Disdik, Dinkes

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021

bappelitbangda